

**RESOLUSI KONFLIK ANTAR NELAYAN DI DESA PESISIR
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
JAWA TIMUR**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SITTI RAHMATIL HASANAH
NIM 211103020002
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**RESOLUSI KONFLIK ANTAR NELAYAN DI DESA PESISIR
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
SITTI RAHMATIL HASANAH
NIM 211103020002
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**RESOLUSI KONFLIK ANTAR NELAYAN DI DESA PESISIR
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Disetujui Pembimbing:

Muhammad Arif Mustaqim S.Sos., M.Sosio
NIP. 198711182023211016

**RESOLUSI KONFLIK ANTAR NELAYAN DI DESA PESISIR
KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

telah diuji diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Achmad Faesol, M.Si
NIP. 198402102019031004

Sekretaris

Fiqih Hidayah T.W.MM.
NIP. 199107072019032008

Anggota

1. Dr. Ali Hasan Siswanto, S.Fil.,M.Fil.I ()
2. Muhammad Arif Mustaqim S.Sos.,M.Sosio ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya : Cukuplah Allah Menjadi Penolong Kami, Dan Allah Adalah Sebaik-Baiknya Pelindung." (QS. Ali-Imran Ayat 173)*



* Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 173, *Al Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2024), 269

PERSEMBAHAN

Puji syukur hadirat Allah Swt. Atas segala rahmat karuh dan hidayahnya yang elalu mengiringi disetiap langkah dalam proses penyusunan skrip iini. Dengan penuh rasa hormat, cinta dan terima kasih yang mendalam, izinkan saya mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang- orang tersayang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan dan akademik kehidupan saya.

Karya ini saya persembahkan pertama- tama kepada bapak saya tercinta Bapak Rusdi, sosok yang penuh keteguhan kesabaran dan kasih sayang dalam diam. Doa-doa beliau yang tak pernah terucap namun selalu saya rasakan menjadi kekuatan besar dalam menghadapi segala tantangan. Terimakasih atas kerja keras dan pengorbanan yang tak terhingga, yang memungkinkan saya berdiri sampai di titik ini. Kepada ibu saya tercinta, Ibu Eliyah, dan kembaran Siti Rahmatul Hasanah, yang telah menjadi pelita dalam hidup saya. Ibu bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai guru, sahabat, dan tempat berpulang di saat suka maupun duka. Doa dan kasih sayang Ibu adalah sumber semangat terbesar yang senantiasa menguatkan saya dalam menghadapi segala ujian dan proses panjang selama penulisan skripsi ini.

Tak lupa, persembahan ini juga saya tujukan untuk almarhum Mbah tercinta , yang selama hidupnya selalu mendoakan, mendampingi, dan menyayangi saya dengan tulus. Meski kini raganya telah tiada, kehangatan dan nasihatnya tetap hidup dalam setiap langkah saya. Semoga Allah Swt. menerima segala amal ibadah beliau ditempatkan di terbaik di sisi- Nya. Amin ya Rabbal '

Alamin. Dan yang tak kalah pentingnya, kepada adik kandung saya tersayang, Khairul Anam , yang dalam kemudahannya selalu mampu menghadirkan tawa dan keceriaan di tengah kepenatan. Terima kasih atas kehadiranmu yang menjadi penyejuk hati dan sumber motivasi dalam menyelesaikan setiap tahap dari proses ini.

Skripsi ini bukan hanya sebuah bentuk tanggung jawab akademik, tetapi juga wujud nyata dari doa, perjuangan, dan kasih sayang kalian semua. Semoga hasil ini dapat menjadi kebanggaan menjadi sederhana bagi kalian yang telah menjadi bagian dari setiap langkah perjuanganku.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, akal, dan kemampuan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam juga saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan umat manusia, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju kehidupan yang terang dengan ajaran Islam yang mulia dan menyeluruh, sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi yang berjudul **“Resolusi Konflik Antar Nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur”** ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik dalam menyelesaikan program Strata 1 (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

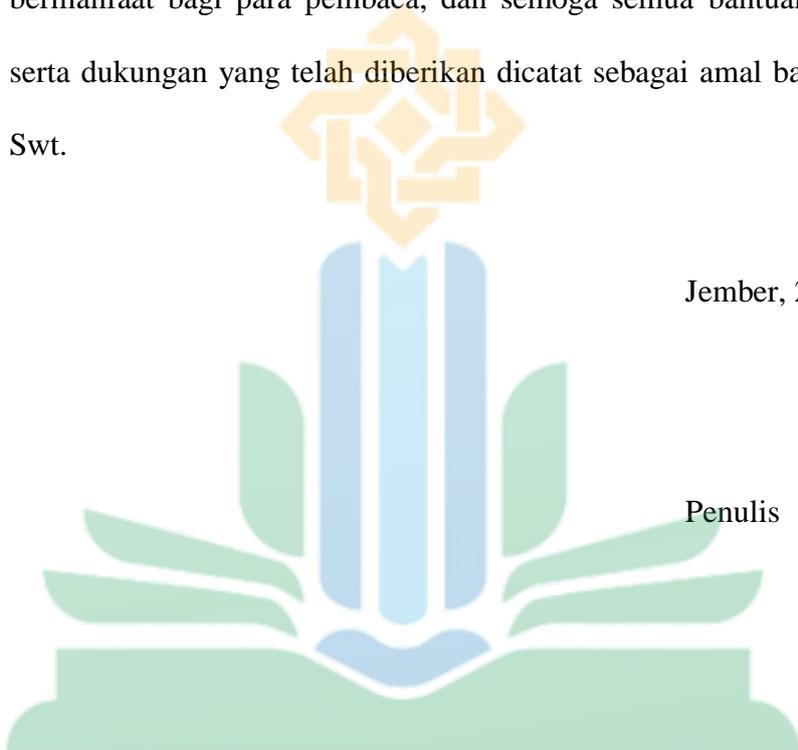
1. Prof. Dr. H Hepni, S.Ag, M.M., selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah yang telah memberikan izin penelitian.
3. Achmad Faesol., M.Si selaku Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Muhammad Arif Mustaqim S.Sos.,M.Sosio., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kepada Juragan Perahu, dan seluruh masyarakat Desa Pesisir yang telah bersedia menjadi informan dan membantu dalam pengumpulan data penelitian.
7. Untuk teman kos yang luar biasa dela, Terima kasih atas tawa, pelukan hangat, candaan receh yang menjadi obat stress, serta pelipur lara saat aku hampir menyerah.
8. Untuk teman seperjuangan skripsi yang seperti saudara sendiri, Bak Fitri sosok yang selalu hadir di setiap kebingungan, yang telah bersedia duduk berjam-jam untuk diskusi yang sabarnya luar biasa menghadapi keluh kesahku.
9. Untuk mayang teman cerita dari penulis, terima kasih sudah selalu ada disaat semua orang tidak bisa aku hubungi, terimakasih selalu ada di saat semua orang meninggalkan.
10. Terakhir untuk pasutri kesayanganku bak irene dan mas husein, terimakasih sudah membantu di setiap semua masalah dan struggle yang di alami oleh penulis, terima kasih usahanya sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih dari sempurna, baik dalam segi materi maupun penyajiannya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian dengan usaha yang maksimal. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga semua bantuan, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Swt.

Jember, 23 Juni 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sitti Rahmatil Hasanah, 2025 : Resolusi Konflik Antar Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur

Kata Kunci: Desa Pesisir, Nelayan, Resolusi Konflik

Kawasan pesisir utara Jawa Timur, khususnya Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan laut yang tinggi. Sebagian besar penduduk di daerah ini menggantungkan hidup mereka pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan tangkap maupun dalam industri pengolahan hasil laut. Namun, pesatnya perkembangan sektor ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah konflik antar nelayan.

Fokus dalam penelitian ini mencakup dua hal utama, yaitu: 1) Bagaimana fenomena konflik yang terjadi di kalangan nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo? dan 2) Bagaimana upaya penyelesaian atau resolusi konflik yang diterapkan dalam menghadapi konflik antar nelayan di wilayah tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam mengenai latar belakang serta bentuk-bentuk konflik yang terjadi di kalangan nelayan, serta memahami mekanisme penyelesaian yang dijalankan dalam merespons permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan menggabungkan sudut pandang sosiologis dan hukum guna melihat proses penyelesaian konflik dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, serta dokumentasi terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas nelayan, antara lain juragan kapal, nelayan, aparat desa, dan warga yang merasakan dampak dari konflik yang terjadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur penyelesaian konflik yang dilakukan melibatkan peran tokoh masyarakat, aparat desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Pesisir. Pendekatan yang digunakan mencakup mediasi, musyawarah mufaka dan penegakan peraturan lokal yang telah disepakati bersama. Efektivitas resolusi konflik sangat dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, kepercayaan antar pihak, dan keberadaan regulasi yang adil. Penelitian ini kesimpulannya adalah penyelesaian konflik secara partisipatif dan berbasis kearifan lokal merupakan pendekatan yang paling relevan dalam menciptakan keharmonisan sosial di komunitas nelayan pesisir.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	20
1. Konsep konflik.....	20
2. Resolusi Konflik.....	22

3. Teori Resolusi Konflik.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
1. Pendekatan Penelitian	29
2. Lokasi Penelitian.....	30
3. Subjek Penelitian.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Analisa Data	33
6. Keabsahan Data.....	35
7. Tahap-Tahap Penelitian	36
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	38
A. Gambaran objek penelitian.....	38
B. Penyajian data.....	44
C. Pembahasan temuan	65
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79
Matriks Penelitian	
Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Dokumentasi Penelitian	
Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pesisir	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Desa Pesisir	38
Gambar 4.2 Kondisi Laut Pesisir	49
Gambar 4.3 Penanda Bersandar Perahu	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kawasan pesisir utara Jawa Timur, khususnya Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan laut yang tinggi. Sebagian besar penduduk di daerah ini menggantungkan hidup mereka pada sektor perikanan, baik sebagai nelayan tangkap maupun dalam industri pengolahan hasil laut. Namun, pesatnya perkembangan sektor ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, salah satunya adalah konflik antar nelayan.

Konflik yang terjadi di kalangan nelayan di Kecamatan Besuki sering kali dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari persaingan untuk mendapatkan wilayah tangkapan, perbedaan alat tangkap yang digunakan, hingga perebutan sumber daya laut yang semakin terbatas. Situasi ini diperburuk oleh meningkatnya jumlah nelayan, keterbatasan area tangkapan, serta perubahan kondisi lingkungan laut yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan. Konflik-konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antar nelayan, tetapi juga pada kestabilan ekonomi masyarakat pesisir secara keseluruhan.

Permasalahan yang kerap terjadi dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering di temukan di berbagai wilayah perairan. Gejala konflik antar nelayan disebabkan perebutan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas.

Perebutan ini muncul karena karakteristik sumberdaya perikanan, seolah-olah sumberdaya dapat dikuasai sembarangan orang¹.

Konflik terkait perebutan sumber daya laut antara nelayan tradisional dan nelayan modern memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat pesisir. Perselisihan ini umumnya muncul akibat perbedaan kepentingan serta cara pandang dalam mengelola sumber daya perikanan. Oleh karena itu, salah satu metode penyelesaian yang kerap dilakukan oleh masyarakat pesisir yang terlibat konflik adalah melalui proses mediasi. Dalam mediasi tersebut, kedua pihak yang berselisih saling menyampaikan pokok permasalahan yang dianggap menjadi sumber konflik. Bentuk interaksi yang terjadi umumnya berlangsung secara langsung atau tatap muka antara dua kelompok yang berseteru guna mencari titik temu dan solusi bersama.

Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan. Meski demikian, keberadaan konflik dapat diatasi dengan efektif jika terdapat peran pemimpin yang mampu mengambil langkah bijak. Dalam konteks ini, yang dimaksud pemimpin adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dan juga tokoh atau pemimpin dari Kelompok Nelayan di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki. Koordinasi dan keharmonisan antara pemerintah daerah dan pemimpin kelompok nelayan perlu dijaga dengan baik agar permasalahan yang muncul,

¹ Agusman Zalukhu, Victoria E. N. Manoppo, dan Jardie A. Andaki, "Analisis Konflik Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)* 5, no. 9 (8 Agustus 2017), <https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.9.2017.17007>.

khususnya yang berkaitan dengan perebutan sumber daya kelautan, dapat diselesaikan secara tepat dan damai.

Sektor perikanan memiliki struktur yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam pemanfaatannya. Di antara para pemangku kepentingan tersebut, nelayan kecil memiliki peran yang sangat penting, mengingat jumlah mereka yang cukup besar. Banyak dari mereka tinggal di daerah terpencil dan memiliki pilihan pekerjaan yang sangat terbatas, sehingga sering kali berada dalam kondisi kemiskinan. Dari sisi sosial dan ekonomi, pemanfaatan sumber daya kelautan sebagian besar masih didominasi oleh pengusaha besar maupun investor asing. Sementara itu, kelompok nelayan—baik skala menengah maupun kecil—yang jumlahnya paling banyak justru menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dan masih hidup dalam kemiskinan di Indonesia.

Secara umum, prinsip pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 33, yang menganut sistem kepemilikan negara *state property*. Dengan sistem ini, pengelolaan sumber daya perikanan bersifat semi terbuka *quasi open access*, artinya akses terhadap sumber daya tersebut dibatasi oleh sejumlah peraturan. Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang dibuat sering kali tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan pemerintah pusat, tanpa memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang terdampak.

Penurunan sumber daya alam laut yang semakin sedikit menjadi salah satu penyebab munculnya konflik di antara pata nelayan. Hal ini di karenakan mobilitas antar wilayah semakin meningkat untuk mencari ikan di lokasi-lokasi yang diperkirakan masih melimpah. Intraksi antara swering terjadi menimbulkan konflik akibat perebutan daerah tangkapan, hingga perilaku sosial yang tidak sesuai. Konflik nelayan adalah ketidakharmonisan diantara pengguna sumber daya perikanan (nelayan) karena belum adanya atau di langgarnya norma dan kesepakatan dalam prinsip pemanfaatan sumber daya perikanan. Konflik dapat muncul karena adanya kesenjangan antara tujuan, sasaran, perencanaan dan fungsi antar berbagai pihak yang terkait.

Sumber daya kelautan dan perikanan yang tersebar lintas wilayah memerlukan pengelolaan yang hati-hati, karena berpotensi menimbulkan konflik. Konflik sendiri dapat diartikan sebagai kondisi ketika dua pihak atau lebih baik individu maupun kelompok memiliki kepentingan yang bertentangan atau merasa tujuannya tidak sejalan. Salah satu pemicu utama konflik antar nelayan adalah menurunnya ketersediaan sumber daya laut. Kondisi ini mendorong nelayan untuk berpindah wilayah demi mencari lokasi penangkapan ikan yang masih melimpah. Mobilitas yang tinggi antar daerah ini kerap memicu ketegangan, terutama karena perebutan wilayah tangkapan dan munculnya perilaku yang tidak etis di antara sesama nelayan.

Salah satu penyebab terjadinya konflik antar nelayan adalah tidak terjalinnya hubungan yang harmonis di antara para pengguna sumber daya perikanan. Hal ini bisa disebabkan oleh belum adanya kesepakatan yang jelas, atau karena pelanggaran terhadap norma yang telah disepakati dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Konflik juga dapat timbul akibat ketidaksesuaian antara tujuan, perencanaan, sasaran, dan peran dari berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, konflik memiliki bentuk yang beragam, mulai dari ketidaksepakatan yang bersifat tersembunyi hingga tindakan kekerasan terbuka. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber konflik, dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka potensi konflik tersebut bisa berkembang menjadi konflik nyata yang berdampak lebih besar.

Perbedaan sikap dan emosi, perbedaan budaya, perbedaan kepentingan, dan perubahan masyarakat Perbedaan tersebut menimbulkan berbagai konflik di berbagai belahan dunia, antara lain konflik politik, konflik rasial, konflik agama, konflik spiritual, dan lain-lain.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 224

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertaqwa, dan menciptakan

kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dan tidak menutup nutupi melalui sumpah, dan janganlah jadi penghalang untuk berbuat kebajikan, dan teruslah bertaqwa serta menciptakan perdamaian di antar manusia. Allah selalu mendengar dan mengetahui apa yang di ucapkan dan di kerjakan oleh setiap orang. Bersumpah yang hanya ucapan lidah saja tanpa sungguh-sungguh tidaklah akan di hukum Allah. Tapi sumpah yang keluar dari hati dan di ucapkan oleh lidah akan di nilai sebagai sumpah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak terkait terkadang justru memunculkan persoalan baru, karena masing-masing pihak memiliki kepentingan, tujuan, dan prioritas yang berbeda. Perbedaan inilah yang sering kali menjadi pemicu timbulnya konflik. Nelayan merupakan profesi utama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Umumnya, mereka mencari ikan di laut dengan berbagai jenis alat tangkap dan kapal yang digunakan. Selain itu, aktivitas penangkapan ikan juga dilakukan di wilayah laut lepas yang tidak memiliki batas wilayah yang jelas dan tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan dan gesekan antar nelayan³. Situasi tersebut sering memicu terjadinya konflik di antara para nelayan di laut. Tingginya tingkat persaingan karena

² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 224, *Al Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2024), 228

³ Nur Hidayati Al Maghfiroh, “Kontruksi Fishing Ground: Konflik Antar Nelayan Kabupaten Lamongan Dan Gresik Tahun 1999-2024” 9, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia no. 2 (2020)*.

banyaknya nelayan yang beraktivitas menyebabkan konflik sulit untuk dihindari. Konflik ini bisa terjadi antar nelayan dari daerah yang sama maupun antara nelayan dari daerah yang berbeda. Berbagai metode kemudian digunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul di antara para nelayan tersebut.

Sumber daya laut yang melimpah, pesisir utara Jawa Timur, termasuk Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo, menjadi pusat aktivitas perikanan bagi para nelayan. Aktivitas ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal. Namun, pesatnya pertumbuhan jumlah nelayan serta penggunaan alat tangkap yang berbeda sering kali menimbulkan konflik antar nelayan, terutama terkait dengan perebutan wilayah tangkap dan sumber daya laut yang terbatas⁴.

Konflik antara nelayan di Kecamatan Besuki terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, kondisi ekonomi yang beragam, serta perbedaan pemahaman mengenai aturan dan etika dalam penangkapan ikan. Nelayan yang memakai alat tangkap tradisional sering merasa dirugikan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap modern, karena dianggap merusak lingkungan dan menurunkan hasil tangkapan. Situasi ini menimbulkan ketegangan yang, jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengancam kestabilan sosial dan ekonomi di komunitas pesisir.

Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya merugikan para nelayan, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan stabilitas

⁴ Aan Eko Widiarto, Setiawan Nurdayasakti, dan Faizin Sulistio, "Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember)," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 2 (17 Mei 2016): 60-69,

sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Oleh sebab itu, diperlukan cara penyelesaian konflik yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pendekatan yang berbasis pada dialog antar pihak yang terlibat, mediasi oleh tokoh masyarakat, serta pemanfaatan kearifan lokal, dapat menjadi solusi yang lebih tepat dalam mengelola konflik antar nelayan di wilayah pesisir utara Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Besuki.

Penelitian mengenai resolusi konflik antar nelayan di Kecamatan Besuki ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penyebab konflik, dinamika interaksi antar nelayan, serta strategi penyelesaian yang telah dan dapat diterapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pemerintah serta upaya-upaya masyarakat lokal dalam menciptakan kondisi perikanan yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, perumusan masalah di sebut “fokus penelitian”. Bagian ini mencantumkan semua fokus masalah yang akan di cari jawabannya selama proses penelitian.

1. Bagaimana fenomena konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana resolusi konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebuah gambaran yang akan digunakan peneliti. Oleh karena itu tujuan penelitian harus selaras dengan fokus penelitian tersebut. Tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena terjadinya konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui resolusi konflik yang dilakukan dalam konteks konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup hasil yang akan diperoleh setelah penelitian selesai. Keuntungan dari penelitian perlu bersifat realistis, mencakup keuntungan teoritis serta praktis bagi para peneliti, institusi, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori resolusi konflik, khususnya dalam konteks masyarakat nelayan. Serta dapat merancang kebijakan lokal yang lebih efektif menangani konflik antar nelayan. Dalam konteks keilmuan, penelitian ini berpotensi sebagai acuan bagi studi lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan dan peraturan yang dirancang untuk mengurangi konflik berbasis sumber daya, terutama di sektor perikanan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan membantu dalam mencegah eskalasi konflik yang lebih besar di masa mendatang dengan menyediakan solusi praktis yang dapat ditetapkan oleh masyarakat nelayan dan pihak-pihak terkait. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan solusi resolutif, ketegangan sosial yang sering timbul akibat perebutan wilayah tangkap ikan dapat diminimalisir.

b. Untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi untuk penelitian lanjutan.

c. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah Kabupaten Situbondo, khususnya Kecamatan Besuki, dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk menyelesaikan dan mencegah konflik antar nelayan. Hal ini dapat berupa peningkatan regulasi mengenai zona penangkapan ikan, pembagian akses sumber daya laut, serta penyediaan mekanisme mediasi yang lebih baik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup pengetahuan istilah-istilah penting yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah orang dalam memahami arti istilah yang dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah yang

dimaksud oleh peneliti. Definisi istilah yang terkait dalam penelitian yakni:

1. Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan perselisihan atau ketegangan antara dua pihak atau lebih melalui metode negosiasi, mediasi, arbitrase, atau cara-cara lainnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks nelayan, resolusi konflik seringkali berfokus pada masalah akses dan pemanfaatan sumber daya alam, seperti wilayah penangkapan ikan.

2. Konflik Antar Nelayan

Konflik antar nelayan merujuk pada perselisihan atau bentrokan yang terjadi antara kelompok atau individu nelayan yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan terkait wilayah penangkapan ikan, alat tangkap, maupun sumber daya laut lainnya.

Konflik ini bisa bersifat terbuka (fisik) atau tersembunyi (ekonomi, sosial), dan dapat mempengaruhi hubungan sosial antar komunitas nelayan.

3. Nelayan Pesisir

Nelayan pesisir adalah sekelompok individu atau komunitas yang bergantung pada sumber daya laut di wilayah pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik dengan menangkap ikan, kerang, maupun sumber daya laut lainnya. Nelayan pesisir umumnya

menggunakan perahu kecil dan teknologi sederhana dalam kegiatan penangkapannya, serta beroperasi di perairan dangkal dekat pantai.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menggambarkan susunan urutan pembahasan dalam skripsi, yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Penulisan pembahasan disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi deskriptif, bukan berupa daftar isi atau indeks.

a. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini membahas tentang wilayah pesisir utara Jawa Timur, khususnya Kecamatan Besuki di Kabupaten Situbondo, yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Berbagai kelompok nelayan dengan penggunaan alat tangkap yang berbeda, seperti jaring, cantrang, dan pancing, menciptakan dinamika sosial yang rumit. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas konflik antar kelompok nelayan meningkat, dipicu oleh persaingan wilayah tangkap, perbedaan jenis alat tangkap, serta pengawasan yang kurang efektif dari pihak berwenang. Konflik ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu hubungan sosial dan kestabilan komunitas pesisir. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bentuk, penyebab, dan penyelesaian konflik tersebut dengan pendekatan ilmiah dan teori yang relevan.

b. Bab 2 Kajian Kepustakaan

Bab ini menguraikan penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif

dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konflik dari sudut pandang para pelaku serta untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan konsentrasi nelayan yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam serta terdapat catatan konflik antar kelompok nelayan.

c. Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menguraikan penggunaan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konflik dari sudut pandang para pelaku serta untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan konsentrasi nelayan yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam serta terdapat catatan konflik antar kelompok nelayan.

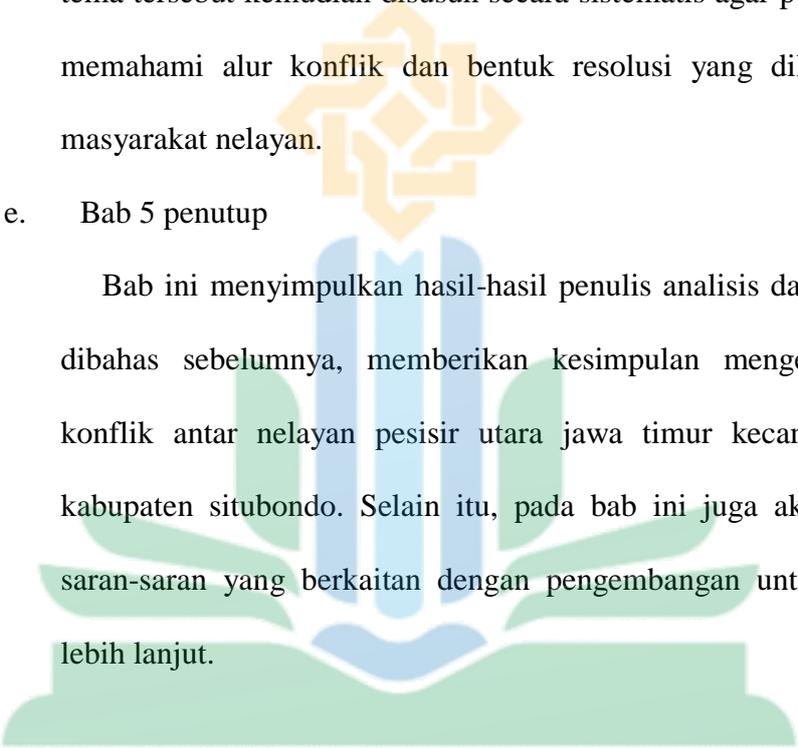
d. Bab 4 Penyajian Data

Bab ini Penyajian data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya data disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan secara menyederhanakan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penyajian data akan membentuk konflik yang terjadi

antar nelayan, aktor- aktor yang terlibat, faktor penyebab konflik, dan dinamika interaksi sosial antar kelompok di Kecamatan Besuki. Data dalam penelitian kualitatif disusun berdasarkan tema- tema tertentu yang muncul dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Tema-tema tersebut kemudian disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur konflik dan bentuk resolusi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan.

e. Bab 5 penutup

Bab ini menyimpulkan hasil-hasil penulis analisis data yang telah dibahas sebelumnya, memberikan kesimpulan mengenai resolusi konflik antar nelayan pesisir utara jawa timur kecamatan besuki kabupaten situbondo. Selain itu, pada bab ini juga akan diberikan saran-saran yang berkaitan dengan pengembangan untuk penelitian lebih lanjut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menguraikan temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menyajikan ikhtisar dari studi-studi yang telah atau belum dipublikasikan.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dibuat oleh peneliti sebelumnya:

- a. Dalam jurnal berjudul “Studi Kasus Konflik Antar Nelayan Akibat Penggunaan Arad di Perairan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal” oleh Muhamad Hanif Yasyfi, Suteki, dan Dyah Wijaningsih (Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022), dijelaskan bahwa penggunaan alat tangkap arad oleh nelayan dipicu oleh kondisi ketersediaan ikan yang tidak menentu. Penggunaan alat ini berdampak negatif, seperti terancamnya kelestarian biota laut dan rusaknya habitat perairan, yang pada akhirnya menurunkan hasil tangkapan serta pendapatan nelayan.⁵ Konflik antar nelayan muncul karena adanya penolakan terbuka terhadap penggunaan arad, di mana para pihak menyampaikan pandangan yang saling bertentangan secara tegas,

⁵ Yasyfi, Muhamad Hanif, Suteki Suteki, And Dyah Wijaningsih. "Studi Kasus Konflik Antar Nelayan Akibat Penggunaan Arad Di Perairan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal." *Diponegoro Law Journal* 11.2 (2022). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.31703>

dan pertentangan ini terjadi secara terus-menerus hingga ketegangan mulai mereda.

- b. Dalam penelitian berjudul “Manajemen dan Resolusi Konflik Komunitas Nelayan di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Komunitas Nelayan Etnis Bugis dan Makassar)” oleh Suparman Abdullah, Mansyur Radjab, Sultan Djibe, Ansar Arifin, dan Haslinda (2022), ditemukan bahwa konflik di kalangan nelayan di Sulawesi Selatan dipicu oleh beberapa faktor, seperti perebutan wilayah penangkapan ikan, perbedaan jenis alat tangkap, kesenjangan pendapatan, serta perbedaan pandangan politik. Untuk meredam konflik dan membangun keharmonisan, komunitas nelayan berupaya menciptakan integrasi dengan mengoptimalkan potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan tradisi, nilai-nilai budaya, ajaran agama Islam, peran lembaga, hubungan kerja, ikatan kekerabatan, serta kesamaan lokasi tempat tinggal.⁶

- c. Dalam jurnal berjudul “Penguatan Lembaga Adat Panglima Laot: Pembelajaran dari Penyelesaian Konflik Nelayan dalam Mewujudkan Komunitas Nelayan yang Inklusif”.⁷ oleh Fadli

⁶ Abdullah, S. ., Radjab, M. ., Djibe, S. ., Arifin, A. ., & Anriani, HB . (2023). Manajemen Dan Resolusi Konflik Komunitas Nelayan Di Sulawesi Selatan: Studi Kasus Komunitas Nelayan Etnis Bugis Dan Makassar. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (Pkns)* , 1 (1), 385–388. <https://Pkns.Portalapssi.Id/Index.Php/Pkns/Article/View/63>

⁷ Afriandi, Fadli, Ligar Abdillah, and Muntaha Mardhatillah. "Penguatan Lembaga Adat Panglima Laot: Pembelajaran dari penyelesaian Konflik Nelayan dalam mewujudkan Komunitas Nelayan yang Inklusif." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 10.1 (2024): 59-70. Vol. 10. No. 1. 2024

Afriandi, Ligar Abdillah dan Muntaha Mardhtillah, dijelaskan bahwa masih terdapat konflik yang terjadi akibat masuknya nelayan luar Aceh Singkil yang menangkap di daerah nelayan lokal di Aceh akibatnya sering terjadi masalah *illegal fishing*.

- d. Rahmat Dilta Harahap, Tahun 2024. Dengan judul “Modal Sosial Sebagai Bentuk Manajemen Konflik Pada Komunitas Di Kabupaten Aceh Barat”. Yang mana dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat konflik dalam pengelolaan sumber daya pesisir pada masyarakat nelayan. Konflik-konflik ini disebabkan oleh perbedaan persepsi dan kepentingan di antara nelayan yang mempengaruhi kehidupan sosial mereka⁸.
- e. Winasis Yulianto, Tahun 2024. Dengan judul “Konflik Klasik Nelayan Tradisional Dengan Nelayan Modern Di Kabupaten Situbondo” yang mana dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan yang merupakan desa yang didapati kelompok nelayan modernnya, dan konflik yang terjadi sampai saat ini.⁹

⁸ Rahmat Dilta Harahap, “Modal Sosial Sebagai Bentuk Manajemen Konflik Pada Komunitas Nelayan Di Kabupaten Aceh Barat,” *Jia (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis Dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian* 9, No. 3 (9 Juli 2024): 226–37, <https://doi.org/10.37149/Jia.V9i3.1160>.

⁹ Yulianto, Winasis, Et Al. "Konflik Klasik Nelayan Tradisional Dengan Nelayan Modern Di Kabupaten Situbondo." *Prosiding Seminar Nasional Unars*. Vol. 3. No. 1. 2024.

Tabel. 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Muhamad Hanif Yasyfi, Suteki, Dyah Wijaningsih	Analisis Konflik Antar Nelayan Akibat Pemakaian Alat Tangkap Arad di Wilayah Perairan Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.	Penelitian ini memiliki persamaan yang mana sama sama terjadinya konflik antar nelayan.	Penelitian ini memiliki perbedaan yang mana konflik terkait alat tangkap yang menyebabkan kepunahan biota laut, sedangkan di penelitian ini terfokus kepada konflik perebutan wilayah terhadap hasil sumberdaya laut.
2.	Suparman Abdullah, Mansyur Radjab, Sultan Djibe, Ansar Arifin, Haslinda B. Anriani	Pengelolaan dan Penyelesaian Konflik dalam Komunitas Nelayan di Sulawesi Selatan (Studi pada Komunitas Nelayan Etnis Bugis dan Makassar).	Penelitian ini memiliki kesamaan yakni terletak pada perebutan wilayah penangkapan ikan.	Perbedaan pada penelitian ini yakni peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan di penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.
3.	Fadli Afriandi, Ligar Abdillah dan Muntaha Mardhtillah	Konflik antara Nelayan luar Aceh Singkil dengan nelayan lokal	Penelitian ini memiliki persamaan yang mana sama sama terjadinya konflik antar	Penelitian ini menunjukkan perbedaan, di mana pada studi sebelumnya konflik dipicu

			nelayan.	oleh penggunaan alat tangkap yang berdampak pada punahnya biota laut, sedangkan dalam penelitian ini, fokus permasalahan terletak pada perebutan wilayah penangkapan terhadap sumber daya laut.
4.	Rahmat Dilta Harahap.	Modal Sosial Sebagai Bentuk Manajemen Konflik Pada Komunitas Di Kabupaten Aceh Barat.	Penelitian ini memiliki persamaan yang mana sama-sama memiliki perspepsi dan kepentingan di antara para nelayan.	Perbedaan pada peneliti memiliki masalah tentang perebutan sumberdaya laut. Sedangkan, pada penelitian ini adalah tata kelola sumber daya pesisir.
5.	Winasis Yulianto	Konflik Klasik Nelayan Tradisional Dengan Nelayan Modern Di Kabupaten Situbondo	Penelitian ini memiliki persamaan yang mana sama-sama konflik daerah penangkapan dan konflik alat tangkap	Penelitian ini memiliki perbedaan yang mana konflik terkait alat tangkap yang menyebabkan kepunahan biota laut, sedangkan di penelitian ini

				terfokus kepada konflik perebutan wilayah terhadap hasil sumberdaya laut.
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

Karena semua penelitian bersifat ilmiah, setiap penelitian harus menyertakan teori yang mendukungnya.

1. Konsep Konflik

Konflik dalam sosiologi merujuk pada proses sosial dimana dua pihak atau lebih berusaha untuk mencapai tujuan yang saling bertentangan atau berbeda melalui tindakan tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, konflik adalah pertentangan atau ketidaksesuaian antara dua kelompok atau individu yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, persepsi, atau nilai.

Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan akses terhadap sumber daya, seperti lahan perikanan atau hasil tangkapan sehingga terjadi perbedaan status sosial atau etnisitas, terkait dengan ini degradasi persaingan untuk memanfaatkan sumber daya.¹⁰

Secara etimologis, istilah konflik (*conflict*) berasal dari kata Latin *configere* yang berarti saling menyerang atau

¹⁰ Wahyudi, A. (2015). Konflik, konsep teori dan permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38-52.
Journal.Unita

bertarung. Konflik dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari satu pihak yang menyebabkan hambatan, gangguan, atau penghalangan terhadap pihak lain, dan kondisi ini bisa terjadi baik antar kelompok sosial maupun dalam hubungan antar individu. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Morton Deutsch, pelopor dalam bidang pendidikan resolusi konflik, yang mengungkapkan bahwa dalam situasi konflik, interaksi sosial antara individu atau kelompok lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan daripada kesamaan. Sementara itu, menurut Scannell, konflik merupakan suatu hal yang wajar dan alami, yang muncul akibat adanya perbedaan persepsi, tujuan, atau nilai-nilai di antara individu dalam sebuah kelompok.¹¹

International Encyclopedia of the Social Sciences, dijelaskan bahwa konflik dalam perspektif antropologi muncul sebagai akibat dari persaingan antara sedikitnya dua pihak. Pihak-

pihak yang terlibat bisa beragam, mulai dari individu, keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas, hingga kelas sosial yang mendukung ideologi tertentu, organisasi politik, etnis, atau kelompok agama tertentu. Oleh karena itu, bentuk dan skala pihak yang terlibat dalam konflik sangat beragam. Selain itu, pemahaman mengenai konflik dalam konteks antropologi tidak dapat dipisahkan dari relasi dan dinamika antar pihak yang

¹¹ Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniro*, 1(1), 1-11.

terlibat, karena makna konflik tersebut selalu berkaitan dengan konteks sosial budaya yang melingkupinya.¹²

2. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu kerangka berpikir umum yang digunakan untuk memahami dinamika yang terjadi dalam sebuah konflik serta cara-cara melakukan intervensi. Namun, untuk memahami dan menangani konflik secara spesifik, dibutuhkan pengetahuan mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat, kondisi sosial di sekitarnya, keinginan dan tujuan mereka, pola-pola perilaku dalam konflik, serta norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sikap yang bersifat kooperatif atau berorientasi pada kemenangan bersama sangat mendukung terwujudnya penyelesaian konflik yang positif. Sebaliknya, sikap yang kompetitif atau bertujuan menang-kalah justru dapat menghambat proses tersebut. Sikap menang cenderung lebih mudah muncul dan bertahan jika seseorang mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya, seperti teman, kolega, atasan, media, atau melalui komunikasi.

Langkah-langkah dalam menyelesaikan konflik sangat bergantung pada pemahaman terhadap konflik sosial itu sendiri. Secara teori, konflik sosial dapat dipandang dari dua sudut

¹² Prayogi, Arditya, et al. "Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial." *Jurnal Sosial dan Humaniro* 1.1 (2025): 1-11.

pandangan yang berlawanan. Pertama, konflik sosial dianggap sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan memiliki fungsi positif dalam masyarakat. Kedua, konflik sosial dilihat sebagai fenomena yang irasional, patologis, dan tidak memberikan manfaat sosial, seperti yang dijelaskan oleh *Dougherty dan Pfaltzgraff*. Perbedaan pandangan ini menghasilkan pemisahan yang jelas dalam berbagai pendekatan teoretis untuk memahami konflik sosial, contohnya adalah perbedaan antara pendekatan klasik dan pendekatan behavioristik.¹³ Dua pandangan ini menimbulkan pengutuban yang nyata dalam berbagai pendekatan teoretis dalam memahami konflik sosial. Sebagai misal, pendekatan klasik dan pendekatan behavioris (perilaku).

Warga masyarakat yang aktif terlibat dalam proses penyelesaian konflik biasanya berasal dari komunitas yang memiliki jaringan sosial dan ikatan emosional yang kuat, yang terbentuk melalui interaksi bersama berdasarkan nilai dan norma yang disepakati serta dijalankan secara sadar. Dalam kesadaran kolektif tersebut, mereka mengembangkan dan melestarikan sejumlah kearifan yang dikenal sebagai kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan lokal ini sesungguhnya merupakan modal sosial yang

¹³ Augusman Zalukhu, Victoria E. N. Manoppo, dan Jardie A. Andaki, "Analisis Konflik Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)* 5, no. 9 (8 Agustus 2017), <https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.9.2017.17007>.

berperan penting dalam memperkuat kebersamaan antarwarga serta membantu mencegah atau menangani konflik, baik di dalam komunitas itu sendiri maupun dengan komunitas lain.

3. Teori Resolusi Konflik John Paul Lederach

John Paul Lederach merupakan salah satu tokoh terkemuka dalam studi perdamaian dan resolusi konflik yang banyak memberikan kontribusi terhadap pendekatan transformatif dalam penyelesaian konflik. Menurut Lederach, konflik bukan semata-mata persoalan yang harus dihindari atau diakhiri, melainkan bagian alami dari kehidupan sosial yang dapat menjadi perubahan jika dikelola dengan benar. Ia menekankan bahwa resolusi konflik harus mengarah pada transformasi hubungan antar pihak yang bertikai, bukan hanya pada penyelesaian permukaan.¹⁴

Lederach memperkenalkan model piramida pembangunan perdamaian yang terdiri dari tiga tingkatan aktor utama:

- (1) tingkat atas (tingkat atas) yang terdiri dari pemimpin politik atau otoritas resmi;
- (2) tingkat menengah (middle range) seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, atau pemimpin organisasi; dan

¹⁴ Mukti, Ajeng Tanjiah Setia, Santi Setiawati, and Uswatun Hasanah. "Pendekatan Manajemen Konflik di MI Bojongmalang: Model Penyelesaian Konflik dan Teknik Negosiasi dalam Membangun Lingkungan Belajar yang Harmonis." *Excellent: Journal of Islamic Studies* 2.1 (2025): 32-40.

(3) tingkat akar rumput (grassroots) yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik

Lederach juga menekankan pentingnya membangun hubungan sosial yang berkelanjutan melalui pendekatan jangka panjang. Resolusi melalui pendekatan jangka panjang. Menyelesaikan konflik tidak cukup hanya dengan mediasi pada saat itu juga, tetapi harus mencakup upaya membangun kepercayaan, saling pengertian, serta perubahan struktur sosial yang melatarbelakangi konflik, seperti akses sumber daya laut, batas wilayah penangkapan, dan tata kelola perikanan. Oleh karena itu, pendekatan Lederach sangat relevan untuk memahami dan merancang strategi penyelesaian konflik antar nelayan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga kultural dan relasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam menyelesaikan konflik antar nelayan di Pesisir Utara Jawa Timur, khususnya di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, penelitian ini menggunakan pendekatan teori resolusi konflik yang dikemukakan oleh John Paul Lederach. Teori ini menekankan bahwa konflik bukan hanya sebuah masalah yang harus diselesaikan, melainkan suatu dinamika sosial yang mengandung potensi transformasi jika dikelola secara konstruktif.

Lederach memperkenalkan pendekatan transformatif , dalam penyelesaian konflik tidak hanya fokus pada pemanasan permusuhan, tetapi juga pada rekonsiliasi hubungan , perubahan struktur sosial , dan pembangunan kepercayaan antar pihak . Dalam kerangka ini, proses penyelesaian konflik dipandang sebagai upaya jangka panjang yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Kerangka pikir Lederach juga menggunakan model piramida perdamaian (piramida pembangunan perdamaian) pembangunan perdamaian) yang membagi pelaku penyelesaian konflik dalam tiga tingkat:

1. Level atas (top-level) , yaitu pemimpin formal atau pejabat pemerintah; Tingkat atas mencakup para pemegang otoritas formal dan pengambil kebijakan tertinggi di tingkat lokal atau regional. Dalam kasus konflik antar nelayan di

Kecamatan Besuki, pelaku pada level ini mencakup pejabat pemerintahan seperti camat, kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten, bupati, aparat kepolisian, serta personel TNI Angkatan Laut yang memiliki kepentingan di wilayah perairan tersebut Peran mereka sangat penting dalam membangun kerangka hukum dan administratif yang menjadi dasar penyelesaian konflik. Mereka bertanggung jawab dalam membuat dan menegakkan kebijakan seperti

pembagian wilayah penangkapan, regulasi alat penangkapan, hingga pemberian izin operasi bagi nelayan lokal maupun luar daerah. Selain itu, mereka memiliki kewenangan untuk memfasilitasi forum-forum resmi penyelesaian konflik, seperti rapat koordinasi antar kelompok nelayan, pertemuan lintas sektor, dan pengesahan kesepakatan damai.

2. Level menengah (middle-range) , seperti tokoh masyarakat atau LSM lokal; Dalam proses penyelesaian konflik, peran mereka sangat strategis. Tokoh masyarakat atau kepala desa biasanya menjadi pihak yang dipercaya oleh komunitas nelayan, Contoh konkrit kontribusi aktor tingkat menengah adalah ketika kepala desa dan tokoh agama memprakarsai pertemuan antar kelompok nelayan tradisional dan nelayan cantrang untuk mencari titik temu tentang Pembagian wilayah tangkap. Atau ketika LSM lokal membantu menyusun peraturan desa (perdes) tentang tata kelola laut yang disepakati bersama oleh masyarakat. Dengan demikian, aktor-aktor di level ini menjadi kunci dalam menciptakan dialog yang berkelanjutan.

3. Level akar rumput (grassroots-level) , yaitu masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik, seperti para nelayan. Akar rumput merupakan inti dari konflik itu sendiri, yaitu

para nelayan yang terlibat langsung dalam keluarga. Mereka terdiri dari berbagai kelompok nelayan, baik yang menetap secara turun-temurun di wilayah pesisir Kecamatan Besuki, maupun nelayan pendatang dari daerah lain yang mencari penghidupan di wilayah tangkap yang sama. Konflik di level ini biasanya muncul karena berbagai faktor, seperti perebutan wilayah tangkap, perbedaan alat tangkap. Pelaku di level akar rumput memegang peranan paling penting dalam implementasi perjanjian damai. Sebab, tanpa keterlibatan aktif mereka, solusi yang dibuat oleh pemerintah atau tokoh masyarakat hanya akan menjadi wacana tanpa realisasi. Oleh karena itu, partisipasi nelayan dalam proses musyawarah, pertemuan mediasi, hingga pengawasan bersama terhadap hasil kesepakatan menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penyelesaian konflik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang merupakan metode yang menggabungkan sudut pandang sosiologis dan hukum dalam mengelola penyelesaian konflik terkait pemanfaatan sumber daya perikanan. Menurut Becker (1968) dalam Mulyana (2001), perspektif mencakup definisi suatu situasi, kumpulan gagasan yang menggambarkan karakter situasi tersebut sehingga memungkinkan pengambilan keputusan atau tindakan, serta penentuan jenis tindakan yang dianggap wajar dan masuk akal untuk dilakukan oleh individu, termasuk standar nilai yang membantu seseorang menilai suatu hal.¹⁵ Pendekatan ini cocok digunakan karena pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik (misalnya, nelayan tradisional, nelayan modern, pemerintah, dan masyarakat). Metode seperti wawancara mendalam atau pengamatan partisipatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait resolusi dan konflik. Serta memungkinkan eksplorasi proses-proses yang tidak terstruktur atau bersifat informal, seperti mediasi oleh tokoh masyarakat pemimpin lokal.

¹⁵ Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5.2 (2024): 198-211.

b. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan tepat mengenai kondisi atau peristiwa serta karakteristik dari suatu populasi atau wilayah tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Peneliti memilih tempat penelitian karena Desa Pesisir Kecamatan Besuki dikenal memiliki karakteristik konflik yang unik antar kelompok nelayan, seperti perbedaan alat tangkap, dan perebutan wilayah penangkapan. Penelitian ini membantu supaya bisa memahami konflik yang mungkin tidak sama dengan konflik di daerah lain serta bisa mengeksplorasi hal-hal yang menarik tentang konflik nelayan.

3. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan tipe data dan sumbernya. Ini meliputi apa yang ingin dicapai, siapa yang akan dijadikan informan atau narasumber, serta cara pemcaharian dan mengumpulkan data yang digunakan untuk memastikan keasliannya. Data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini dapat diperoleh dari subjek atau sumber informasi yang memahami secara mendalam bagaimana terjadi konflik yang ada di Desa Pesisir

Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan/menunjuk sendiri dalam penelitiannya. Tentunya dalam pemilihan teknik ini penulis telah memilih orang tersebut karena dianggap paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, atau dianggap sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Adapun subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa
- b. Juragan Perahu
- c. Masyarakat Nelayan

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang akan digunakan diuraikan disini, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumen. Oleh karenanya di penelitian ini memiliki 3 cara :

- a. Observasi

Peneliti menerapkan metode observasi non-partisipatif, di mana peneliti tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diteliti. Peneliti hanya mengamati dari luar tanpa ikut berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. atau intraksi dengan subjek secara langsung. Peneliti juga bisa menjaga jarak dan objektivitas lebih baik karena tidak terlibat dalam situasi yang diamati. Subjek cenderung tidak merasa terganggu oleh kehadiran peneliti.

b. Wawancara

Menurut Esterberg, wawancara merupakan suatu pertemuan di mana dua individu bertemu untuk saling berbagi informasi dan opini melalui sesi tanya jawab sehingga dapat membentuk arti untuk topik tertentu¹⁶.

Jika peneliti hendak melakukan studi awal untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, wawancara menjadi metode yang diutamakan dalam pengumpulan data. Selain itu, wawancara juga berguna ketika peneliti ingin memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai responden, mereka dapat melakukan wawancara¹⁷.

Peneliti memiliki untuk menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur untuk mengeksplorasi masalah secara terbuka dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Selain itu, mereka tetap mengikuti pedoman wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang sudah berlalu, seperti foto, gambar hidup, sketsa, karya besar lainnya.

Teknik ini menggunakan berbagai jenis dokumentasi, termasuk data

¹⁶ Chrissyca Halim, Ngajudin Nugroho, dan Fauzi Akbar Maulana Hutabarat, "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independet Medan," *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (Februari 2019).

¹⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2 ed. (Bandung: 29, 2022).139-144

tertulis, rekaman suara, gambar, video, dan lain lain, untuk meningkatkan hasil data lapangan.

5. Analisi Data

Pada bagian ini, langkah langkah yang akan digunakan untuk melakukan analisa data dijelaskan. Ini memberikan ilustrasi tentang bagaimana peneliti akan menjalankan pengelolaan data, mencakup langkah pelacakan, pengorganisasian, dan penjelasan data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mengumpulkan data dari berbagai sumber menggunakan teknik pengumpulan yang beragam (triangulasi) dan dilakukan secara berkelanjutan hingga data mencapai titik kejenuhan. Data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif, dan metode analisis yang digunakan tidak mengikuti pola tertentu, sehingga menghadapi tantangan dalam mengelola data yang tidak konsisten.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, dilakukan selama proses pengumpulan data sedang berlangsung dan setelahnya periode waktu tertentu telah selesai. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yang diuraikan oleh Miles dan Huberman dan didasarkan oleh penelitian lapangan. Adapun langkah-langkah yang terkait yakni:

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilapangan, serta sumber data dan jenis data yang digunakan, semuanya berkaitan dengan

pengumpulan data penelitian. Sumber data utama dicatat menggunakan catatan tertulis atau menggunakan pengambilan foto, film, atau rekaman audio/vidio.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan harus dicatat dengan cermat dan detail. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, semakin banyak dan kompleks data yang dikumpulkan, semakin mendesak pula untuk segera melakukan analisis data. Proses ini meliputi pengurangan dan peringkasan data, pemilihan informasi yang paling relevan, serta identifikasi tema dan pola yang muncul.

c. Menyajikan Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, data diatur dan disusun dalam pola-pola hubungan tertentu agar lebih mudah untuk dipahami.

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data mempermudah pemahaman terhadap kejadian yang berlangsung serta membantu merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Dalam proses penyajian data, selain menggunakan teks naratif, peneliti juga dapat memanfaatkan berbagai bentuk visual seperti grafik, matriks, jaringan kerja, atau diagram. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peneliti benar-benar memahami informasi yang diperoleh.

d. Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diambil bersifat sementara dan dapat berubah jika pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang kuat. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sah. Dengan demikian, hasil penelitian kualitatif bisa saja menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan sejak awal, namun juga memungkinkan untuk berubah karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

6. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil peneliti untuk memastikan bahwa temuan lapangan adalah valid. Peneliti harus meneliti kredibilitas hasil dengan melihat triangulasi lebih lanjut (menggunakan berbagai sumber, penelitian, teori), berbicara dengan teman sejawat, menganalisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber untuk pengecekan keabsahan data.

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi sebagai teknik untuk menguji keabsahan data berarti menggunakan berbagai metode untuk mengecek data yang berasal dari sumber yang sama, seperti wawancara, sebelum membandingkannya dengan hasil observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika ketiga pendekatan tersebut menghasilkan temuan yang berbeda, peneliti kemudian berdiskusi dengan sumber data guna menentukan data mana yang paling dapat dipercaya.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah metode untuk menilai keandalan data dengan mengumpulkan dan memeriksa informasi dari berbagai sumber berbeda. Misalnya, untuk menilai gaya kepemimpinan seseorang, data diperoleh dari bawahan, atasan yang memberikan tugas, dan rekan kerja. Data dari ketiga sumber ini tidak dianalisis dengan cara dirata-rata seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan dideskripsikan, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk melihat kesamaan atau perbedaan pandangan dari masing-masing sumber. Dengan demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan dan memverifikasi hasilnya melalui diskusi dengan para sumber data.

7. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan yang akan dilakukan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan,

pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan laporan. Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Sebelum terjun ke lapangan, peneliti perlu menyusun rencana penelitian, membuat matrix, menyusun proposal, menyelesaikan surat izin, dan menyiapkan peralatan.

b. Tahap Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan ini, penelitian di lapangan dengan memperhatikan dan serius terhadap objek yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, mereka menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mengumpulkan data.

c. Tahap Penyelesaian Masalah

Setelah semua data dikumpulkan dan diproses sesuai dengan analisis sebelumnya, tahap terakhir dalam studi lapangan yang dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada bagian ini, peneliti memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu Desa Pesisir yang berada di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo

1. Profil Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo



Gambar 4.1:

Peta Desa Pesisir

Sumber: Profil Desa 2025

Kecamatan Besuki merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terletak di pesisir utara Jawa Timur. Wilayah ini mempunyai potensi kelautan yang cukup besar dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Terdapat beberapa Desa Pesisir di kecamatan ini yang menjadi pusat kegiatan perikanan, seperti Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dan lainnya.

Desa Pesisir merupakan satu desa yang berada di Kabupaten Situbondo yang terletak di Kecamatan Besuki. Desa Pesisir memiliki luas 165.152 (Ha) dengan garis pantai 1.409 (km) . Sesuai dengan namanya, Desa Pesisir adalah daerah yang berada dipinggir pantai, terdapat pelabuhan pemberhentian kapal yang berlayar ke Madura, sekaligus terdapat tempat penangkapan dan pelelangan ikan (TPI). Desa Pesisir dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Kecamatan Besuki. Hasil tangkap ikan yang melimpah tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga distribusi ke beberapa kota tetangga. Pelabuhan di Desa Pesisir juga berfungsi sebagai tempat persinggahan perahu nelayan dan perahu penumpang dari Pulau Madura, sehingga sangat membantu dalam sektor perikanan dan transportasi laut.

Penduduk Desa Pesisir merupakan masyarakat asli dengan logat khas yang terdengar tegas. Kehidupan sehari-hari mereka banyak dipengaruhi oleh aktivitas perikanan dan budaya pesisir. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan menunjukkan semangat gotong-royong dan kebersamaan kuat di antara warga desa.

Desa Pesisir dapat diakses melalui jalur darat dan laut, dengan pelabuhan yang melayani penyebrangan ke Pulau Madura. Lokasinya yang strategis di pesisir utara Jawa Timur menjadikan sebagai titik penting dalam jaringan transportasi dan distribusi hasil perikanan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Desa Pesisir merupakan desa dengan potensi ekonomi yang kuat di sektor perikanan, didukung oleh budaya

masyarakat yang khas dan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warganya.

2. Sejarah Berdirinya Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Pada tahun 1800, sebuah kapal pelayaran mengalami kandas di wilayah pantai yang kini dikenal sebagai Desa Pesisir. Kapal tersebut berasal dari Minangkabau dan sedang dalam perjalanan menuju wilayah timur Indonesia. Karena terjadi kerusakan pada alat penggerak kapal, rombongan memutuskan untuk beristirahat di Selat Madura, yang pada masa itu masih berupa kawasan semak belukar yang belum berpenghuni. Pemimpin rombongan tersebut bernama Astubo.

Astubo merasa betah dan nyaman saat beristirahat di kawasan pantai tersebut, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pelayarannya. Ia kemudian menetap di daerah pantai yang kini dikenal sebagai Desa Pesisir, dan melakukan perluasan wilayah pesisir hingga mencapai kondisi seperti saat ini. Desa ini dinamakan Desa Pesisir karena wilayah yang dikembangkan oleh Astubo berada di sepanjang garis pantai atau pinggir laut. Untuk menghormati jasa dan kerja kerasnya dalam membangun desa tersebut, nama Astubo diabadikan sebagai nama jembatan pertama di Desa Pesisir, yaitu Jembatan Astubo.¹⁸

¹⁸ Sulthon, A. S. I., Dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural Melalui Edu-Ekowisata: Studi Kasus Paguyuban Paku Lima Dusun Mandaran Desa Pesisir

3. Visi Dan Misi Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Visi: “Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil Dan Berdaya.”

Misi:

- a. Membangun Masyarakat Situbondo Beriman Dalam Keberagaman.
- b. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas Dan Meningkatkan Peran Perempuan
- c. Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan Dan Berdaya Siang.
- d. Membangun pemerintahan dan professional.¹⁹

4. Mata Pencaharian (Kondisi Ekonomi Penduduk) di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Terkadang masyarakat juga memiliki mata pencaharian ganda. Hal ini disebabkan oleh faktor kesempatan kerja, apabila sedang ada peluang bekerja di proyek bangunan ada yang mampu menjadi tukang dan juga buruh. Jika sedang tidak ada, mereka beralih kepada usaha beternak dan juga ketergantungan kepada musim yang sedang berjalan. Mengenai masalah tersebut, berikut data jenis mata pencaharian warga masyarakat Desa Pesisir.

¹⁹ Samsuri, Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektoral (Situbondo, 2024)133

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Penduduk di Desa Pesisir

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persen	Kondisi Usaha
1.	Nelayan	98	34,63	Aktif
2.	Pegawai Swasta	3	1,06	Aktif
3.	Pegawai Negeri	3	1,06	Aktif
4.	Tukang	6	2,12	Aktif
5.	Pedagang	70	24,73	Aktif
6.	Supir	10	3,53	Aktif
7.	Buruh	5	1,77	Aktif
	Jumlah	195 Jiwa	68%	

Sumber : Data Desa Pesisir Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pesisir yaitu sebagai nelayan. Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Desa Pesisir, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai nelayan, yaitu sebanyak 98 jiwa atau 34,63% dari total jumlah penduduk yang tercatat dalam tabel. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi desa tersebut. Selain nelayan, terdapat pula beberapa jenis pekerjaan lain seperti pegawai swasta dan pegawai negeri masing-masing sejumlah 3 jiwa (1,06%), tukang sebanyak 6 jiwa (2,12%), pedagang 70 jiwa (24,72%), sopir 10 jiwa (3,53%), dan buruh 5 jiwa (1,77%).²⁰

Seluruh jenis pekerjaan yang tercantum dalam tabel memiliki status usaha yang masih aktif, yang mencerminkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat di desa ini masih berjalan dengan baik. Jumlah keseluruhan

²⁰

Miftah, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 29 Desember 2024

individu yang tercatat dalam tabel ini adalah 195 jiwa, yang setara dengan 68% dari total penduduk desa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat usia produktif di Desa Pesisir terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, dengan ketergantungan utama pada hasil laut.

5. Kondisi Geografis Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Desa Pesisir adalah salah satu desa yang terletak di daerah Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur yang berada di sebelah barat pusat kecamatan. Pesisir adalah sebuah desa yang sangat berdekatan dengan laut, memberikan potensi, memiliki lokasi strategis, dan mudah di akses serta banyak sekali orang yang datang untuk mencari ikan, Adapun batas wilayah Desa Pesir sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara: Selat Madura
- b. Sebelah Selatan: Desa Besuki Kecamatan Besuki
- c. Sebelah Timur: Desa Demung Kecamatan Besuki
- d. Sebelah Barat: Desa Kalianget Kecamatan Banyuglugur

Asal usul penduduk Desa Pesisir sebagian besar adalah asli pribumi yang sudah menetap sejak nenek moyang dan sebagiannya adalah pendatang yang namun relatif sangat sedikit karena pada umumnya adalah pendatang yang menikah dengan penduduk pribumi dan menetap di Desa Pesisir. Desa pesisir adalah desa yang berada di area pantai selat Madura, dan wilayahnya terbagi menjadi 6 (enam) dusun, antara lain:²¹

²¹ Samsuri, Profil Daerah Dan Analisis Statistik Sektoral (Situbondo, 2024) Hlm 133

- a. Dusun Petukangan.
- b. Dusun Krajan
- c. Dusun Gudang
- d. Dusun Lesanan Kidul
- e. Dusun Lesanan Lor
- f. Dusun Mandaran

Berbicara mengenai letak strategis wilayah Desa Pesisir dapat dilihat juga dari orbitasi, yang artinya ketak suatu desa yang memiliki pusat aktivitas yang berperan penting untuk pengembangan desa tersebut. Letak orbitasi Desa Pesisir beserta pusat kegiatan ekonominya adalah sebagai berikut:

- a. Jarak ke kecamatan: 1,4 km (hanya waktu 5 menit)
- b. Jarak ke alun-alun besuki: 1 km (hanya butuh waktu 4 menit)
- c. Jarak ke pasar besuki: 900 m (hanya butuh waktu 3 menit)
- d. Jarak ke kabupaten/kota: 38 km (butuh waktu sekitar 1 jam)

B. Penyajian Data

Penyajian data mencakup penjelasan data dan hasil yang di dapat dengan menerapkan metode atau prosedur yang telah dijelaskan seperti bab-bab sebelumnya. Uraian ini berisi tentang deskripsi data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dalam bentuk pola, tema, kecenderungan dan motif yang muncul dari data.

Berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat dua jenis pengumpulan data, yaitu observasi yang

dilakukan oleh peneliti dan data pendukung yang diperoleh melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai dasar pengumpulan data yang relevan dengan fokus penelitian, mencakup data yang bersifat umum atau global hingga data yang lebih spesifik, yang akan dijelaskan lebih lanjut berikut ini:

1. Fenomena Terjadinya Konflik Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Fenomena konflik nelayan merujuk pada kejadian atau situasi yang melibatkan pertentangan, kemunduran, atau pertikaian antar nelayan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan profesi mereka sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Konflik ini bisa berupa perbedaan kepentingan, perebutan akses terhadap sumber daya laut, peraturan yang tidak jelas atau tidak diterima oleh kelompok nelayan, serta ketegangan yang muncul akibat kesulitan ekonomi atau ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dari hasil tangkapan laut. Fenomena ini sering terjadi di daerah-daerah pesisir yang memiliki komunitas nelayan yang besar dan beragam, dengan sumber daya yang terbatas

Dalam konteks ini, konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo bukan sekedar masalah individu, tetapi lebih merupakan dinamika sosial yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena konflik ini dapat dipicu oleh faktor internal maupun eksternal yang bersifat struktural, kultural, atau ekonomi.

Bentuk konflik yang terjadi sangat beragam, mulai dari adu mulut, saling sindir, hingga pada situasi tertentu bisa berujung pada kegagalan atau tindakan perusakan. Namun, tidak semua nelayan bereaksi dengan cara yang sama. Hal ini umumnya dilakukan oleh nelayan yang lebih tua atau yang sudah terbiasa dengan dinamika di pelabuhan. Sementara nelayan yang merasa tidak puas atau baru masuk ke wilayah tersebut cenderung lebih sensitif dan menuntut pengakuan atas haknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, konflik yang terjadi di antara nelayan umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu permasalahan wilayah tangkap, alat tangkap, dan hasil tangkapan. Perselisihan terkait wilayah tangkap muncul ketika batas-batas wilayah laut yang menjadi sumber penghidupan mereka tidak diatur secara jelas, sehingga sering terjadi tumpang tindih area tangkap antara nelayan satu dengan yang lainnya. Selain itu, penggunaan alat tangkap modern oleh sebagian nelayan, seperti jaring trawl dan alat bantu lainnya, menimbulkan kecemburuan sosial terhadap nelayan yang masih menggunakan alat tradisional.²²

Ketidaksetaraan ini seringkali memperuncing hubungan antar nelayan lokal itu sendiri. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini sebagian besar adalah sesama nelayan lokal. Walaupun terdapat beberapa kasus kecil yang melibatkan nelayan pendatang, namun mayoritas konflik

²² Rahmad, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 11 April 2025

terjadi antar komunitas lokal itu sendiri, yang hidup berdampingan namun sering bersaing dalam memperebutkan sumber daya laut yang terbatas.

Bentuk-bentuk konflik yang terjadi di lapangan umumnya berupa cekcok mulut, adu argumen keras, hingga berujung pada perkelahian fisik. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di laut saat aktivitas penangkapan ikan berlangsung, tetapi juga sering terbawa hingga ke darat, mempengaruhi hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka.²³

Menariknya, konflik ini bukan fenomena baru. Berdasarkan kesaksian para nelayan, konflik antar nelayan di Desa Pesisir sudah berlangsung sejak lama dan bersifat turun-temurun. Hingga saat ini, belum terdapat upaya penyelesaian yang terfokus dan efektif dari pihak berwenang maupun komunitas nelayan itu sendiri. Akibatnya, konflik terus berulang dan menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat pesisir di wilayah ini.²⁴

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab utama terjadinya konflik antar nelayan. Keterbatasan sumber daya ikan di wilayah pesisir membuat persaingan antar nelayan semakin tajam.²⁵ Setiap nelayan berusaha

²³ Rahmad, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 11 April 2025

²⁴ Rahmad, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 11 April 2025

²⁵ Candra Dkk “Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboraan Lepas Pantai” *Journal Syntax Idea Vol. 6, No. 10, Oktober 2024*

mempertahankan dan memperjuangkan wilayah tangkap serta hasil laut yang mereka anggap sebagai sumber utama penghidupan. Ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sektor perikanan ini mendorong nelayan untuk bersaing dengan keras, sehingga rentan memicu konflik.

Hal ini sebagaimana yang disimpulkan oleh Bapak Miftah berikut ini

“Nelayan besar pakai mesin besar, alat canggih. Kita yang pakai perahu kecil dan alat sederhana jelas kalah jauh. Sekali melaut, mereka bisa bawa pulang 100 kilo lebih, kita pulang 20-30. Dampaknya, di pasar harga ikan jadi anjlok, karena banyak yang jual. Nah, kita yang modalnya kecil rugi duluan. Mulailah ada omongan, ada yang nuduh ini, bahkan sampai terbuka.”²⁶

Salah satunya faktor ekonomi yang menyebabkan konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yakni munculnya rasa iri bahkan curiga antar nelayan besar dalam mendapatkan hasil melaut mereka karena dapat mempengaruhi proses pendapatan hasil melaut mereka dengan harga yang sangat anjlok.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Miftah, diwawancara oleh penulis, Situbondo 29 Desember 2024

b. Faktor Wilayah dan Kepemilikan Rumpun Laut



Gambar:4.2
Kondisi Laut di Pesisir
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Ketidakjelasan batas wilayah tangkap di laut menyebabkan sering terjadinya tumpang tindih area pencarian ikan. Selain itu, adanya sistem kepemilikan rumpun, yaitu lokasi-lokasi tertentu di laut yang dianggap "milik" nelayan tertentu, memperparah potensi konflik. Saat ada nelayan lain yang mengambil hasil tangkapan dari rumpun tersebut, timbul rasa tidak terima yang sering berujung pada cekcok mulut, perselisihan, bahkan perkelahian. Ketiadaan kesepakatan tertulis mengenai batas rumpun juga memperbesar kemungkinan konflik antar nelayan.²⁷

Konflik antarnelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi dan lemahnya regulasi, tetapi juga oleh masalah batas wilayah penangkapan dan kepemilikan rumpun laut. Dalam konteks lokal, rumpun laut (biasanya berupa rumpun atau tempat berkumpulnya ikan) dianggap sebagai aset milik kelompok

²⁷ Febri Karisma Dkk, Konflik Alat Tangkap Ikan Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 2, No 2, Desember 2018*

atau individu nelayan tertentu. Namun, di sisi lain, wilayah laut secara hukum nasional adalah sumber daya bersama, sehingga sering terjadi tumpang tindih antara klaim kepemilikan adat dengan prinsip keterbukaan laut.

Konflik muncul ketika nelayan dari kelompok luar atau desa memasuki wilayah laut yang secara informal dianggap sebagai milik kelompok nelayan tertentu. Rumpun laut yang telah dipasang oleh kelompok lokal sering kali dirusak atau dimasuki oleh nelayan luar yang tidak memenuhi batas-batas yang telah disepakati secara lisan. Tidak adanya peta zonasi laut di tingkat desa membuat persoalan kepemilikan menjadi abu-abu dan rentan menimbulkan konflik terbuka. Para nelayan juga terkadang merasa adanya tekanan terhadap tempat wilayah dan kepemilikan rumpun tersebut

“Mbak, kami di sini punya rumpun yang sudah kami pasang sendiri, pakai biaya kelompok. Tapi sering ada nelayan dari luar yang ikut ambil ikan di situ. Padahal mereka tidak ikut pasang, tidak ikut rawat. Waktu kami tegur, mereka bilang laut ini milik umum. Itu yang membuat kami nyaman. Pernah dibuat kesepakatan lisan antar kelompok, tapi tidak pernah ditulis. Tidak ada peta resmi juga. Jadi ya susah kalau ada yang lewat, tidak bisa dilaporkan ke mana-mana. Akhirnya cuma bisa adu mulut atau kadang sampai perahu rusak.”²⁸

Wilayah rumpun laut dalam konteks ini mencerminkan adanya klaim yang dikelola secara tradisional oleh kelompok nelayan lokal. Meski laut adalah milik negara (berdasarkan prinsip hukum laut Indonesia), dalam praktiknya masyarakat pesisir sering

²⁸ Miftah, Diwawancarai Oleh Penulis, Situbondo 29 Desember 2024

mengembangkan sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal yang bersifat eksklusif dan kolektif. Sayangnya, sistem ini seringkali tidak diakomodasi secara resmi oleh hukum negara, terutama jika tidak ada dokumen tertulis atau peta wilayah yang diakui oleh aparat atau pemerintah daerah.

Konflik muncul ketika ada perbedaan persepsi antara prinsip umum (laut milik bersama) dan realitas lokal (laut dikelola bersama oleh komunitas tertentu dengan aturan tidak formal). Tanpa penguatan kelembagaan dan legalitas, maka wilayah yang dikelola secara lokal seperti rumpun akan terus rentan terhadap konflik dan eksploitasi oleh pihak luar.

c. Faktor Perubahan Musim

Perubahan musim di laut, terutama saat musim paceklik (kurangnya hasil tangkapan), memperbesar potensi konflik antar nelayan. Pada musim ini, jumlah ikan yang dapat ditangkap berkurang drastis, sehingga persaingan semakin ketat. Ketika sumber daya laut terbatas, nelayan lebih mudah tersulut emosinya saat merasa wilayah atau hasil tangkapannya terganggu oleh pihak lain.

"Kalau musim barat datang, ombak besar, nelayan banyak yang berpindah lokasi penangkapan. Kadang nelayan dari luar Besuki masuk ke wilayah sini, karena di tempat mereka ombak lebih besar. Itu yang sering bikin memicu, karena wilayah penangkapan jadi rebutan., bahkan meskipun kami pakai GPS, radar, jadi biasa tetap mencari ikan meski musim berubah. Tapi nelayan kecil terkadang

marah, katanya kami kuasai wilayah menangkap mereka, padahal laut ini kan luas.”²⁹

Dalam konteks ini perubahan musim menampilkan dinamika penting: bahwa laut bukan hanya ruang alam, tetapi juga ruang sosial-ekonomi yang diperebutkan. Ketika musim barat memaksa nelayan berpindah lokasi, ruang tangkap menjadi arena persaingan terbuka, terutama antara nelayan lokal dan pendatang. Ketegangan ini bukan hanya karena keberadaan fisik, tetapi juga karena persepsi tentang "hak" atas ruang tangkap.

Teknologi seperti GPS dan radar menambah dimensi baru dalam konflik: muncul "ketimpangan akses" yang membuat nelayan kecil merasa kalah saing. Meskipun laut secara hukum adalah milik negara dan bersifat terbuka, dalam praktik sosial, ada pengakuan informal atas "wilayah biasa" yang digunakan oleh kelompok nelayan tertentu. Ketika batas tidak diatur dengan baik, maka musim berubah pun bisa menjadi pemicu konflik.

d. Faktor Lemahnya Regulasi Pemerintah Lokal

Konflik antar nelayan yang terjadi di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi maupun perebutan ruang penangkapan, tetapi juga diperparah oleh lemahnya peraturan yang dikeluarkan dan dijalankan oleh pemerintah lokal. Lemahnya regulasi ini dapat dilihat dari minimalnya aturan yang jelas dan tegas mengenai zona penangkapan,

²⁹ Miftah, Diwawancarai Oleh Penulis Situbondo 29 Desember 2024

pengawasan alat tangkap ilegal, hingga pembagian fasilitas umum seperti tempat bersandar perahu. Akibatnya, ruang laut wilayah menjadi abu-abu yang diperebutkan secara bebas oleh berbagai kelompok nelayan.

Minimnya aturan resmi atau kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan wilayah tangkap menjadi celah terjadinya konflik. Lemahnya peran aparat dalam mengawasi dan menengahi perselisihan di laut juga memperburuk situasi konflik. Selain itu, lemahnya kapasitas pengawasan dan penegakan hukum juga mengizinkan keadaan. Nelayan yang melanggar aturan jarang dikenai sanksi tegas, sehingga menimbulkan kesan bahwa pelanggaran dibiarkan atau bahkan dilindungi oleh pihak-pihak tertentu. Dalam wawancara dengan beberapa nelayan, mereka menyampaikan kekecewaan karena laporan mereka tidak dilanjutkan secara serius oleh aparat desa maupun instansi kelautan setempat. Ia menyatakan:

“Tidak ada aturan yang jelas Mbak, Pernah dengar katanya mau bikin aturan zona penangkapan, tapi sampai sekarang belum jalan. Jadinya semua bebas ambil ikan di mana saja, tanpa batas. Itu bikin sering bertabrakan.”

³⁰

Lemahnya regulasi dari pemerintah lokal, khususnya dalam penetapan dan penerapan zona penangkapan, menjadi faktor struktural yang memicu konflik antar-nelayan. Tanpa aturan yang jelas dan kuat, ruang laut menjadi terbuka bagi siapa pun, sehingga potensi

³⁰ Miftah, diwawancarai oleh penulis, situbondo 29 desember 2024

persinggungan kepentingan dan benturan semakin tinggi. Ketika tidak ada regulasi yang melindungi wilayah tradisional atau lokal, maka konflik akan muncul karena masing-masing pihak merasa berhak, tanpa adanya sistem mediasi atau perlindungan hukum yang berpihak.

e. Faktor Egoisme dan Solidaritas Kelompok

Tingginya solidaritas dalam kelompok nelayan tertentu seringkali memperuncing konflik antar kelompok. Setiap kelompok cenderung membela anggotanya tanpa mempertimbangkan kebenaran objektif, sehingga memperbesar eskalasi konflik kecil menjadi konflik kelompok. Selain itu, sikap egoisme dalam mempertahankan kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memedulikan hak nelayan lain juga turut menjadi penyebab pertikaian di antara mereka.

Faktor Egoisme dan Solidaritas Kelompok. Selain persoalan ekonomi, wilayah, dan lemahnya regulasi, konflik antar nelayan juga diperkuat oleh faktor egoisme individu dan solidaritas kelompok.

Dalam masyarakat nelayan, hubungan sosial biasanya terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki jaringan solidaritas tersendiri, baik berdasarkan lokasi, jenis alat tangkap, maupun asal wilayah. Solidaritas ini memunculkan semangat kebersamaan internal, namun sering kali berubah menjadi sikap eksklusif dan defensif terhadap kelompok luar. Dalam kondisi tersebut, kelompok ego lebih dominan dibandingkan kepentingan bersama sebagai sesama nelayan.

Ketika satu kelompok merasa dirugikan, respons yang muncul bukan hanya dari individu, tetapi seluruh kelompok, yang menyebabkan konflik dengan cepat membesar. Egoisme juga terlihat dari keengganan sebagian nelayan untuk mematuhi aturan bersama jika merasa aturan itu merugikan kelompoknya.

“Kita sering bahkan sering mbak Di sini, setiap nelayan itu pasti tergabung dalam kelompok, biasanya berdasarkan alat tangkap. Kalau ada satu anggota yang ada masalah, semua ikut pasang badan. Walaupun kadang dia salah, tetap kami bela. Karena itu soal harga diri kelompok.”³²

Kelompok nelayan di wilayah pesisir bukan hanya unit kerja, tetapi juga unit sosial dengan identitas, solidaritas, dan struktur informal. Ikatan kelompok ini menjadi sumber kekuatan kolektif dalam menghadapi tekanan ekonomi, persaingan, dan konflik. Namun, kekuatan tersebut juga bisa menjadi bumerang ketika solidaritas berubah menjadi pembelaan buta yang menutup dialog ruang.

Faktor egoisme dan solidaritas kelompok memainkan peran ganda: memperkuat ikatan internal namun juga meningkatkan potensi konflik eksternal. Ketika solidaritas tidak diimbangi dengan mekanisme evaluasi dan penyelesaian konflik yang adil, maka konflik kecil bisa berkembang menjadi pertentangan antar kelompok yang berkelanjutan.

;

³² Miftah, diwawancarai oleh penulis, situbondo 29 desember 2024

f. Faktor tempat bersandar perahu



Gambar 4.3
Penanda Bersandar perahu
Sumber : Dokumentasi Peneliti

Konflik antar nelayan di wilayah pesisir Kecamatan Besuki juga terjadi pada aspek penggunaan tempat sandar atau parkir perahu. Tempat sandar merupakan kawasan yang sangat vital bagi para nelayan karena menjadi lokasi mereka menurunkan hasil tangkapan, memperbaiki perahu, maupun bersiap melaut kembali. ³³Namun, keterbatasan lahan sandar di wilayah pesisir seringkali memicu ketegangan antar sesama nelayan.

Konflik biasanya muncul ketika seorang nelayan menemukan tempat sandarnya telah ditempati oleh perahu nelayan lain. Padahal, sebagian besar nelayan di wilayah ini telah memiliki alat penanda masing-masing untuk menunjukkan lokasi sandar yang biasa mereka gunakan, seperti bollrad (beton untuk menahan tali kapal). Penanda

³³ Husen, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 29 Desember 2024

tersebut berfungsi sebagai bentuk pengakuan tidak tertulis atas hak sandar yang telah disepakati secara adat atau kebiasaan bersama.

Salah satu nelayan lokal yang saya temui beliau yang mengangkat masalah konflik tempat bersandar perahu (dermaga/tradisional), yang merupakan bagian penting dari konflik sosial di desa pesisir:

“Oh iya, memang benar. Tempat bersandar itu sekarang sempit, makin tahun makin padat. Kami nelayan kecil sering kesulitan mendapatkan tempat. Kadang harus antre lama, kadang malah terpaksa sandar di tempat orang lain, yang bisa bikin salah paham. Padahal juga sudah berikan penanda setiap mereka mau bersandar perahunya. Makanya Sudah pernah dibahas waktu musyawarah desa, tapi belum ada solusi nyata. Katanya mau dibangun tempat bersandar tambahan, tapi lahannya tidak ada kejelasan. Kadang kelompok nelayan juga bikin jadwal sandar”³⁴

Ketegangan antarindividu maupun antarkelompok, dan menunjukkan pentingnya pendekatan tata kelola ruang pesisir secara partisipatif dan berkeadilan, Hasil diatas menunjukkan bahwa konflik tempat bersandarnya perahu merupakan bentuk konflik spasial yaitu perebutan ruang atau fasilitas yang terbatas.

1. Resolusi Konflik Antar Nelayan Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Resolusi konflik adalah proses penyelesaian tabrakan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak yang terlibat, serta menghindari kekerasan dan kerusakan sosial. Secara kontekstual, resolusi

³⁴ Rahmad, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 11 April 2025

konflik melibatkan berbagai teknik penyelesaian masalah, seperti dialog, negosiasi, mediasi, atau kompromi, yang fokus pada penyelesaian akar masalah yang memicu konflik.

Dalam konteks konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki, resolusi konflik bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi di lapangan seperti, persaingan wilayah penangkapan sesama nelayan, wilayah kepemilikan rumpun dan tempat bersandar perahu. Konflik semacam ini sering kali melibatkan nelayan yang merasa wilayah penangkapan mereka terancam oleh nelayan luar bahkan wilayah mereka di ambil oleh nelayan lain. Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus diupayakan untuk menjaga keharmonisan sosial dan kepunahan kehidupan nelayan serta menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terdiri dari nelayan lokal, tokoh masyarakat, dan aparat desa, diketahui bahwa penyelesaian konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki sebagian besar dilakukan melalui cara-cara nonformal dan berbasis kearifan lokal.

Salah satu bentuk resolusi yang paling sering dilakukan adalah musyawarah antar nelayan, terutama saat terjadi konflik terkait pengambilan hasil tangkapan dari rumpun milik orang lain. Setiap nelayan pada umumnya diketahui memiliki wilayah tangkapan yang tidak tertulis.

Maka dari itu, ketika terjadi pelanggaran wilayah tersebut konflik bisa timbul, baik dalam bentuk mulut hingga kekacauan.³⁵

Namun, sebagian besar nelayan menyatakan bahwa mereka lebih memilih menyelesaikan konflik secara damai baik sesama nelayan karena mereka menyadari pentingnya menjaga hubungan baik sesama nelayan. Dalam beberapa kasus, konflik diselesaikan melalui pembagian hasil laut secara sukarela sebagai bentuk kompromi. Proses ini sering kali difasilitasi oleh tokoh masyarakat, seperti kepala kelompok nelayan atau senior nelayan yang dihormati.

Sementara itu, keterlibatan pemerintah desa maupun aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik ini sangat minim. Para nelayan cenderung menyelesaikan permasalahan mereka sendiri karena adanya anggapan bahwa masalah di laut adalah urusan “internal nelayan”. Dalam wawancara dengan salah satu nelayan, ia menyatakan:

"Kalau ada yang ambil rumpun orang lain, ya biasanya kita omongin baik-baik. Kadang ya bagi hasil saja, supaya nggak ribut. Soalnya kalau sama-sama cari makan, mending damai."³⁶

Pola penyelesaian konflik yang terjadi antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki masih bersifat tradisional dan tidak terlembagakan. Mekanisme penyelesaian konflik lebih mengandalkan hubungan sosial,

³⁵ Endang Bidayani, Dan Kurniawan. “ Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Antara Nelayan Dengan Penambang Timah Dan Inkonvensional,”*Society Volume 8*, (2020).139

³⁶ Rahmad, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 11 April 2025

musyawarah, dan peran tokoh masyarakat dibandingkan sistem formal atau pemerintahan.³⁷

Hal ini dapat dikaji melalui pendekatan Teori Resolusi Konflik Lokal yang menjelaskan bahwa dalam komunitas tradisional, penyelesaian konflik cenderung dilakukan melalui cara-cara internal yang berdasarkan nilai kekeluargaan, solidaritas sosial, dan musyawarah mufakat.

Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya sanksi atau keputusan yang mengikat secara hukum, sehingga konflik yang sama bisa terjadi kembali. Fakta bahwa konflik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan belum ada solusi permanen menunjukkan bahwa resolusi konflik yang ada masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar masalah.

Ketiadaan peraturan tertulis tentang batas wilayah penangkapan, pengelolaan rumpun, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah memperkuat analisis bahwa struktur penyelesaian konflik di tingkat lokal masih sangat lemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara masyarakat nelayan, tokoh lokal, dan pemerintah desa untuk membentuk forum atau lembaga mediasi yang lebih formal dan berkelanjutan.

Salah satu nelayan lokal yang ditemui saya di Desa Pesisir menyampaikan bahwa konflik nelayan sebenarnya bukan hal baru. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar masalah terjadi karena persoalan

³⁷ Endang Bidayani, Dkk. "Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Antara Nelayan Dengan Penambang Timah Inkonsional,"³⁰

wilayah penangkapan yang tidak tertulis, terutama mengenai lokasi rumpun. Dalam wawancaranya, ia mengatakan:

“Rumpun itu semacam tempat kita naruh rumpon, jadi ikan-ikan banyak berkumpul di situ. Nelayan di sini biasanya punya rumpun masing-masing. Tapi karena tidak ada batas resmi, kadang-kadang ada juga yang sengaja atau tidak sengaja mengambil hasil di rumpun orang lain. Di situ biasanya mulai cekcok. Kalau sudah emosi, bisa ribut, kadang saling teriak di tengah laut, bahkan ada yang pernah sampai baku hantam di perahu.”³⁸

Lebih lanjut, narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa upaya penyelesaian konflik akhirnya dilakukan secara kekeluargaan:

“Kita ini hidup dari laut, jadi sebisa mungkin jangan sampai sampai musuh sama nelayan lain. Kalau ada masalah, biasanya kita ajak ngobrol baik-baik. Kadang yang lebih tua, nelayan senior atau tokoh dusun yang bantu selesaikan. Pernah juga saya bagi hasil sama yang ambil ikan dari rumpun saya, biar sama-sama enak. Walau hati masih nggak enak, tapi mending gitu daripada balas dendam-dendam.”³⁹

Sementara itu, narasumber lain yang juga merupakan tokoh nelayan di desa tersebut mengatakan bahwa pemerintah desa selama ini belum mempunyai sistem atau regulasi khusus untuk menangani konflik nelayan:

"Kami ini di lapangan mengetahui kondisinya sendiri seperti apa. Tapi sayangnya, dari desa atau dinas belum ada aturan yang ngatur batas laut, atau siapa boleh di mana. Jadinya ya semua jalan sendiri-sendiri. Kalau tidak ada kesadaran sendiri dari nelayan, ya bisa tiap minggu ada ribut. Tapi selama ini masih bisa diselesaikan di kampung sendiri, belum sampai ke polisi atau kantor desa."

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dapat diidentifikasi beberapa pola penyelesaian konflik yang mencerminkan karakter

³⁸ Rahmad, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 11 April 2025

³⁹ Sahimi, diwawancara Oleh Penulis Situbondo 29 Desember 2024

masyarakat nelayan pesisir. Penyelesaian konflik tidak dilakukan melalui lembaga formal, tetapi melalui pendekatan informal yang mengandalkan kearifan lokal dan solidaritas komunitas.

a. Musyawarah Dan Peran Tokoh Lokal

Konflik yang muncul antara para nelayan, seperti pelanggaran wilayah rumpun atau pengambilan hasil tangkapan oleh nelayan lain, cenderung diselesaikan melalui pertemuan tidak resmi. Musyawarah sering dilakukan secara langsung di lokasi, seperti di dermaga, balai nelayan, atau bahkan di tengah laut setelah terjadi kemunduran.

Tokoh nelayan, seperti ketua kelompok atau nelayan senior, sering kali memainkan peran penting sebagai penengah. Keberadaan tokoh ini menjadi bentuk kepemimpinan informal yang dihormati oleh para nelayan karena pengalaman dan hubungan sosial mereka. Hal ini sesuai dengan teori penyelesaian konflik berbasis komunitas, di mana aktor lokal memegang peran penting dalam meredakan konflik melalui pendekatan sosial dan kultural.

Dalam menghadapi konflik yang terjadi antar kelompok nelayan, musyawarah menjadi metode penyelesaian utama yang diterapkan secara lokal. Proses ini tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai, tetapi juga tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati, seperti kepala dusun, tokoh agama, dan sesepuh nelayan.

Bapak Sonoto (usia 63 tahun), seorang tokoh masyarakat dan mantan nelayan senior, menjelaskan bahwa konflik biasanya

diselesaikan melalui pertemuan informal yang disediakan oleh tokoh lokal:

“Kalau ada nelayan yang berselisih, biasanya kami kumpulkan dulu di pingir pantai selesai mereka melaut. Tidak langsung ke polisi, karena masih bisa diselesaikan dengan musyawarah. Saya sebagai yang dituakan, biasanya diminta bantuan menenangkan emosi, mereka lebih suka diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dibawa ke hukum, malah tambah panjang. Biasanya kami mengundang tokoh seperti ustad, atau juragan perahu, dan kedua belah pihak untuk duduk bersama. Sudah jadi kebiasaan di sini. Kami sampaikan bahwa rezeki sudah ada yang atur. Jangan rebutan laut, nanti malah bisa dosa. Alhamdulillah, dengan cara itu hati mereka lebih mudah dilunakkan”⁴⁰

b. Kompromi dan Pembagian Hasil

Dalam kasus tertentu, solusi yang diambil untuk menyelesaikan konflik adalah dengan cara membagi hasil tangkapan . Meskipun secara prinsip setiap nelayan memiliki batas wilayah rumpun yang dipahami bersama, pelanggaran yang tidak disengaja kadang-kadang tetap terjadi. Dalam kondisi seperti ini, kompromi seperti pembagian hasil menjadi jalan tengah yang dianggap adil dan menghindari eskalasi konflik.

Kompromi ini muncul bukan karena adanya peraturan tertulis, melainkan karena adanya norma sosial dan kesadaran kolektif . Dalam teori konflik fungsionalis, hal ini mencerminkan konflik bahwa justru dapat memperkuat nilai kebersamaan ketika individu dalam komunitas mampu menyesuaikan diri dan membentuk solusi bersama.

⁴⁰ Sonoto, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 12 April 2025

nelayan tradisional menjelaskan bahwa ketika ada dua kelompok nelayan yang berselisih karena menangkap ikan di wilayah yang sama, solusi yang paling sering digunakan adalah membagikan hasil tangkapan secara adil:

“Kami dudukkan dua pihak yang berselisih, lalu hitung hasil tangkapan. Kadang-kadang dibagi rata, kadang sesuai siapa yang memasang jaring duluan. Intinya adil dan tidak saling curiga, Kalau kami sampai ribut besar, rugi semua. Mau melaut jadi tidak tenang. Jadi lebih baik sepakat saja bagi hasil, meski sedikit yang penting damai.”⁴¹

c. Ketidakhadiran Peran Pemerintah

Dalam beberapa konflik yang terjadi antar nelayan di Kecamatan Besuki, masyarakat nelayan mengeluhkan minimnya peran aktif pemerintah, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Ketidakhadiran pemerintah dalam penyelesaian konflik ini menimbulkan kesan bahwa nelayan dibiarkan menyelesaikan masalah mereka sendiri, tanpa regulasi atau dukungan kelembagaan yang jelas.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah minimalnya peran pemerintah desa maupun institusi formal lainnya dalam proses penyelesaian konflik. Tidak terdapat aturan tertulis tentang batas wilayah penangkapan laut, pengelolaan rumpun, maupun sistem pelaporan konflik antar nelayan.

Hal ini menyebabkan penyelesaian konflik sangat bergantung pada hubungan sosial dan kearifan lokal. Kondisi ini berisiko menciptakan

⁴¹ Sonoto, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 12 April 2025

ketidakadilan atau konflik berulang karena tidak adanya kepastian hukum atau mekanisme penyelesaian yang mengikat.

Nelayan di Desa Pesisir, menyampaikan bahwa selama ini konflik hanya diselesaikan secara mandiri oleh kelompok nelayan, tanpa ada campur tangan atau kehadiran langsung dari pemerintah:

“Kalau ada masalah, ya kami selesaikan sendiri. Pemerintah jarang turun. Paling kalau sudah banyak baru datang, tapi itu pun kadang cuma dengar saja.”⁴²

Bahkan beberapa nelayan merasa bahwa aparat pemerintah hanya hadir secara formal, misalnya saat ada program bantuan atau kegiatan seremonial, tetapi tidak dalam situasi kritis ketika konflik sedang berlangsung

“Kalau soal bantuan alat, mereka datang. Tapi pas kami ribut sama nelayan luar, tidak ada yang membantu menyelesaikannya. Kami yang atur sendiri dengan musyawarah.”⁴³

C. Pembahasan Temuan

1. Fenomena konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, fenomena konflik antar nelayan di wilayah ini merupakan peristiwa sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat pesisir. Konflik ini muncul dalam berbagai

⁴² Sonoto, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 12 April 2025

⁴³ Sonoto, diwawancara Oleh Penulis, Situbondo 12 April 2025

bentuk, mulai dari perselisihan kecil seperti cekcok mulut dan adu argumen keras, hingga perkelahian fisik baik di tengah laut maupun ketika kembali ke darat. Bentuk konflik tersebut utamanya dipicu oleh permasalahan wilayah tangkap, alat tangkap, dan hasil tangkapan yang dianggap tidak seimbang antar nelayan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik antar nelayan di Desa Pesisir tidak hanya bersifat sementara, tetapi sudah menjadi konflik laten yang terus berulang akibat tidak adanya penyelesaian struktural yang memadai. Ketika nelayan merasa wilayah tangkapnya dilanggar atau hasil tangkapan dari rumpun miliknya diambil oleh nelayan lain, ketegangan pun mudah terjadi. Hal ini diperkuat dengan ketimpangan dalam penggunaan alat tangkap, di mana sebagian nelayan telah menggunakan alat modern seperti jaring trawl yang hasil tangkapannya jauh lebih besar dibandingkan nelayan tradisional. Ketimpangan ini menimbulkan kecemburuan sosial dan memperuncing persaingan antar sesama nelayan lokal.

Pendekatan John Paul Lederach terhadap transformasi konflik memberikan lensa teoretis yang sangat tepat. Lederach menyarankan bahwa konflik bukan hanya kondisi permukaan yang harus diselesaikan secara reaktif, tetapi juga sebagai ekspresi hubungan sosial yang perlu dialami dan diubah. Teori Lederach mengarahkan analisis tentang pentingnya merekonstruksi struktur sosial yang memungkinkan orang untuk hidup secara damai melalui perubahan

hubungan, saling pengertian, dan penciptaan sistem sosial yang terintegrasi.⁴⁴

Konflik antar nelayan di Desa Pesisir mengilustrasikan bagaimana hubungan sosial di tingkat akar rumput telah mengalami permasalahan yang serius. Antara kelompok nelayan lokal dan kelompok luar terbentuk identitas yang saling bertentangan: satu pihak merasa sebagai pemilik sah atas wilayah laut mereka, sementara pihak lain merasa dapat mencari penghidupan di wilayah manapun karena laut dianggap sebagai milik umum. Ketegangan ini diperparah dengan beredarnya narasi bahwa kelompok nelayan luar “serakah” dan tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian laut, sementara kelompok lokal dianggap terlalu kolot dan eksklusif. Dalam kerangka Lederach, konflik ini merupakan krisis relasional yang tidak akan selesai tanpa ada upaya serius untuk membangun kembali kepercayaan dan komunikasi yang sehat antar pihak.

Teori Lederach menekankan pentingnya keterlibatan tiga tingkat kepemimpinan dalam proses transformasi konflik: kepemimpinan tingkat atas, kepemimpinan tingkat menengah, dan kepemimpinan akar rumput. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, fungsi ketiga tingkatan ini belum berjalan optimal. Pihak tingkat atas seperti Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo atau aparat penegak hukum cenderung menyatakan normatif dan hanya bergerak jika konflik telah

⁴⁴ Kurniadi, Akbar, Dkk. "Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara* 9.1 (2019): 91-108.

menimbulkan gejolak terbuka. Tidak ada strategi jangka panjang yang dirancang untuk mencegah konflik, seperti penguatan kelembagaan nelayan, pembentukan zona penangkapan berdasarkan kesepakatan lokal, atau pembinaan seluruh kelompok nelayan. Intervensi formal hanya terjadi dalam bentuk pelarangan alat tangkap tertentu, namun kebijakan ini sering tidak efektif karena pengawasan yang lemah dan tidak adanya kontrol sosial dari komunitas itu sendiri. Sementara itu, kepemimpinan tingkat menengah seperti kepala desa, tokoh agama, atau pengurus kelompok nelayan sebenarnya memiliki potensi sebagai jembatan komunikasi, tetapi minim fasilitas dan dukungan. Tokoh-tokoh ini sering ditempatkan sebagai pelaksana administratif daripada agen mediasi. Dalam beberapa kasus, mereka juga mengalami dilema karena memiliki hubungan sosial yang kompleks dengan kelompok nelayan yang berkonflik, sehingga enggan menyatakan secara tegas. Kondisi ini membuat mereka kesulitan membangun ruang dialog yang netral dan terbuka.⁴⁵

Aktor akar rumput, yaitu para nelayan, menjadi pihak yang sangat berdampak langsung namun justru paling jarang dilibatkan dalam penyusunan prosedur atau penyelesaian konflik. Mereka hanya dianggap sebagai sasaran yang harus mengikuti ketetapan dari atas. Padahal, dalam teori Lederach, perubahan yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika masyarakat akar rumput diberi ruang untuk

⁴⁵ Susetyo, Susetyo, Ikram Ikram, And Anita Damayantie. "Pendekatan Sistemik Untuk Analisis Dan Transformasi Konflik: Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Balinuraga." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24.1 (2022): 108-125.

menyuarakan kepentingannya secara kolektif dan dilibatkan dalam setiap proses transformasi. Keterlibatan ruang ini membuat mereka mencari solusi sendiri, yang sering kali bersifat konfrontatif.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa dialog antar kelompok hampir tidak pernah terjadi secara langsung. Pemerintah desa ini pernah memfasilitasi pertemuan, tetapi hanya menghadirkan satu pihak dan bersifat monolog. Kesepakatan yang dihasilkan tidak bersifat inklusif dan tidak mengikat secara sosial karena tidak dibangun dari kesepahaman kolektif. Bahkan, dalam beberapa wawancara, tokoh nelayan menyatakan bahwa mereka tidak pernah diajak dalam proses penyusunan aturan zona tangkap atau peraturan alat tangkap. Hal ini memperkuat asumsi bahwa sistem pengambilan keputusan masih bersifat atas bawah (*top-down*), serta tidak ditemukannya inisiatif pembangunan perdamaian dalam jangka waktu yang panjang .

Dalam lensa Lederach, proses membangun perdamaian harus bersifat berkelanjutan, melembaga, dan berbasis pada keadilan sosial.

Namun di Desa Pesisir, tidak ada lembaga nelayan lintas kelompok yang aktif, tidak ada forum musyawarah tetap, dan tidak ada program pelatihan atau edukasi bersama tentang pengelolaan sumber daya laut.

Semua aktivitas nelayan berlangsung dalam sistem yang individualistik dan kompetitif, tanpa semangat kolaborasi. Dalam situasi seperti ini, konflik bukan hanya sulit dihindari, tetapi justru berpotensi terus berkembang menjadi kekerasan terbuka. Dengan memahami konflik

ini melalui teori Lederach, menjadi jelas bahwa pendekatan penyelesaian konflik yang selama ini diterapkan masih bersifat kaku. Padahal, diperlukan pendekatan yang transformatif, yang tidak hanya menyelesaikan masalah di permukaan tetapi juga menysar akar permasalahan secara struktural dan kultural. Membangun kembali komunikasi, memperkuat jaringan sosial, menciptakan aturan bersama yang adil, serta memberdayakan masyarakat akar rumput menjadi prasyarat penting dalam menciptakan perdamaian sejati di masyarakat nelayan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antar nelayan bukan sekadar gejala kompetisi ekonomi, melainkan ekspresi dari keretakan sosial yang lebih dalam. Untuk meresponsnya, diperlukan kebijakan dan strategi yang menggabungkan pendekatan formal dengan pendekatan partisipatif, serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan demikian, transformasi konflik sebagaimana yang dikemukakan John Paul Lederach dapat diwujudkan secara nyata di lapangan.

2. Upaya penyelesaian konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Upaya penyelesaian konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menunjukkan dinamika sosial yang rumit, karena melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan posisi yang berbeda-beda. Berdasarkan temuan dari peneliti di lapangan, peneliti memperoleh informasi bahwa penyelesaian konflik

ini tidak terjadi melalui satu jalur formal saja, melainkan melalui kombinasi pendekatan informal, inisiatif lokal, dan intervensi pemerintah.⁴⁶

Metode yang paling sering digunakan dalam penyelesaian konflik adalah mediasi oleh aparat desa atau tokoh masyarakat. Bahkan Jika terjadi gesekan antara kelompok nelayan lokal dengan nelayan luar daerah yang menggunakan alat tangkap terlarang, biasanya kepala desa atau tokoh agama dipanggil untuk menengahi permasalahan konflik yang terjadi. Pertemuan-pertemuan informal dilakukan, namun sayangnya mediasi ini sering kali hanya melibatkan pihak yang sedang terlibat secara langsung, tanpa ada proses dokumentasi atau pengambilan keputusan yang mengikat secara sosial. Akibatnya, kesepakatan yang dihasilkan bersifat lisan, tidak diikuti oleh tindakan konkret, dan mudah dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian konflik belum memiliki sistem yang kuat dan berkelanjutan.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan teori John Paul Lederach, situasi ini mencerminkan bagaimana upaya penyelesaian konflik belum memenuhi prinsip dasar dari transformasi konflik. Lederach menekankan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya soal menghentikan kekerasan atau membuat kesepakatan formal, tetapi juga

⁴⁶ Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. (2009). *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta LKIS Yogyakarta

⁴⁷ Nugraheni Arumsari Dkk “Startegi Komunikasi Dalam Upaya Penelesaian Komflik Nelayan Pantai Utara Di Kabupaten Batang” *Integralistik* Volume 31 (1) (2020)

tentang membangun hubungan sosial baru yang dilandasi rasa saling percaya, keadilan, dan kolaborasi. Dalam konteks Desa Pesisir, belum terlihat adanya upaya yang menyentuh lapisan relasi sosial tersebut. Mediasi dan hukum hanya menysar gejala permukaan, bukan pada struktur yang membuat konflik terus berulang

Menurut Lederach, proses penyelesaian konflik harus melibatkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di akar rumput (*grassroots*). Namun dalam kenyataannya, para nelayan yang menjadi aktor utama dalam konflik justru jarang dilibatkan dalam forum-forum penyelesaian. Mereka hanya dipanggil saat konflik terjadi dan jarang diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan mereka tentang solusi jangka panjang. Tidak adanya partisipasi ini menyebabkan banyak dari mereka merasa tidak memiliki keterlibatan atau kepemilikan terhadap keputusan yang diambil. Padahal, Lederach menyebutkan bahwa keterlibatan akar rumput sangat penting dalam menciptakan rasa keadilan dan tanggung jawab bersama terhadap perdamaian. Upaya penyelesaian konflik juga belum menyentuh level kelas menengah (*mid-range leadership*), secara maksimal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pengurus kelompok nelayan yang seharusnya menjadi penghubung antar kelompok. Mereka yang mempunyai kelas menengah justru tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memainkan peran sebagai fasilitator perdamaian. Tidak ada pelatihan mediasi, tidak ada pendampingan dari

lembaga luar, dan tidak ada kelembagaan lokal yang kuat yang bisa menjadi tempat semua pihak duduk bersama. Dalam ketiadaan struktur ini, mereka hanya berperan sebagai penengah sesaat, ditambah permasalahan penyelesaian konflik tidak adanya keterlibatan dari lapisan tingkat atas yang terdiri dari pemimpin mereka bahkan cenderung diam dan tidak mencerminka sebagai agen transformasi yang dapat mengarahkan komunitas kepada sistem sosial yang benar, jujur serta lebih harmonis lagi.⁴⁸

Dari pengamatan dan wawancara di lapangan, peneliti juga menemukan bahwa penyelesaian konflik belum memiliki arah strategis jangka panjang. Tidak ada program pembangunan perdamaian (*peacebuilding*) yang berbasis masyarakat. Tidak ada peraturan desa atau kesepakatan komunitas yang secara resmi mengatur pembagian wilayah tangkap, batas waktu melaut, atau jenis alat tangkap yang diperbolehkan. Tidak pula ada forum lintas kelompok yang bertugas menjaga komunikasi dan menyelesaikan konflik sejak dini. Semua berjalan secara sporadis, tergantung pada kekuatan tokoh lokal atau tekanan situasi yang muncul. Dalam kerangka Lederach, ini menunjukkan tidak adanya sistem yang memungkinkan perubahan struktural dan kultural yang menjadi prasyarat bagi transformasi konflik.

⁴⁸ Nurliana Cipta Apsari Dan Santoso Tri Raharjo “Resolusi Konflik Nelayan Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 1(2021). 29

Konflik antar nelayan di Desa Pesisir pada akhirnya menjadi lingkaran berulang: konflik terjadi, dimediasi secara sederhana, mereda sementara, lalu muncul kembali dengan pola yang sama. Tidak ada pembelajaran kolektif, tidak ada dokumentasi konflik, dan tidak ada upaya untuk membangun sistem pencegahan. Dalam situasi seperti ini, Lederach menyarankan agar pendekatan resolusi konflik diubah menjadi pendekatan transformasi konflik, yaitu dengan membangun struktur sosial baru yang mampu menciptakan hubungan yang sehat, adil, dan tahan terhadap gesekan kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik antar nelayan di Desa Pesisir belum memenuhi prinsip-prinsip transformasi konflik sebagaimana dikembangkan oleh John Paul Lederach. Dibutuhkan pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berkelanjutan, di mana para aktor dari berbagai tingkat mulai dari nelayan, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah—terlibat secara aktif dalam menciptakan solusi bersama. Hanya dengan membangun kesadaran kolektif, memperkuat kelembagaan lokal, dan menciptakan forum komunikasi yang inklusif, konflik antar nelayan dapat diselesaikan secara bermartabat dan berkelanjutan.⁴⁹

⁴⁹ Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. (2009). *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta LKIS Yogyakarta

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, dapat diambil beberapa kesimpulan penting sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

1. Konflik Antar Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Fenomena konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki merupakan persoalan sosial yang telah terjadi secara turun-temurun. Konflik ini dipicu oleh perebutan sumber daya laut yang terbatas, khususnya terkait batas wilayah tangkap, ketimpangan alat tangkap, dan hasil tangkapan yang tidak merata. Konflik tersebut muncul dalam berbagai bentuk seperti cekcok mulut, perkelahian fisik, hingga ketegangan antar kelompok nelayan, baik saat melaut maupun di darat.

Permasalahan ini diperburuk oleh ketiadaan aturan tertulis tentang batas wilayah tangkap dan lemahnya peran pemerintah desa. Ketidaksetaraan dalam akses alat produksi, seperti alat tangkap modern dan tradisional, memicu kecemburuan sosial. Selain itu, konstruksi sosial masyarakat nelayan yang mewariskan wilayah rumpun secara turun-temurun memperkuat eksistensi konflik ini.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Antar Nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Upaya penyelesaian konflik antar nelayan di Desa Pesisir lebih banyak dilakukan melalui mekanisme informal berbasis kearifan lokal. Musyawarah antar nelayan dan peran tokoh masyarakat seperti nelayan senior dan ketua kelompok menjadi cara utama dalam menyelesaikan konflik. Bentuk kompromi berupa pembagian hasil tangkapan atau kesepakatan damai kerap menjadi solusi yang ditempuh demi menjaga hubungan sosial antarsesama nelayan. Penyelesaian ini mencerminkan Teori Resolusi Konflik Lokal yang menekankan pentingnya peran tokoh masyarakat dan nilai kekeluargaan dalam meredakan konflik. Namun, pola penyelesaian ini memiliki kelemahan karena bersifat tidak terlembagakan dan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga konflik serupa berpotensi berulang. Hal ini memperkuat pandangan Teori Sistem Sosial Talcott Parsons yang menyatakan bahwa stabilitas sosial memerlukan norma, institusi, dan mekanisme pengendalian sosial yang formal dan efektif.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, Desa Pesisir diharapkan dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam menangani dan mencegah konflik antar nelayan. Hal ini dapat dilakukan melalui Penyusunan aturan lokal (perdes) mengenai batas wilayah tangkap dan penggunaan alat tangkap secara adil dan berkelanjutan, Fasilitasi dialog rutin antar kelompok nelayan untuk membangun komunikasi dan kerja sama dan Pembentukan forum mediasi

berbasis desa yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan kelompok nelayan sebagai mediator.

2. Masyarakat nelayan diharapkan terus menjaga nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Selain itu Perlu adanya pelatihan manajemen konflik dan penguatan kapasitas organisasi kelompok nelayan secara berkala.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk Menjelajahi aspek lain yang belum banyak dibahas, seperti peran lembaga hukum, pengaruh ekonomi pasar, atau konflik antara nelayan lokal dan luar daerah secara lebih spesifik dan Melakukan studi komparatif di wilayah pesisir lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang konflik nelayan di Jawa Timur atau wilayah lainnya.

Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang fenomena konflik antar nelayan yang terjadi di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, baik dari segi faktor penyebab maupun upaya penyelesaian yang dilakukan. Konflik tersebut tidak hanya dipicu oleh persoalan ekonomi, tetapi juga oleh ketidakjelasan aturan, ketimpangan sosial, serta konstruksi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat pesisir. Penyelesaian yang selama ini dilakukan secara informal terbukti efektif untuk meredam konflik dalam jangka pendek, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh.

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan para nelayan untuk bersama-sama membangun

sistem pengelolaan sumber daya laut yang adil, berkelanjutan, serta menyusun regulasi yang dapat meminimalisir terjadinya konflik di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis yang ingin mengkaji konflik sosial masyarakat pesisir dari perspektif yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Eko Widiarto, Setiawan Nurdayasakti, dan Faizin Sulistio, "Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember)," *Jurnal Hukum PRIORIS* 3, no. 2 (17 Mei 2016): 60-69,
- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 224, *Al Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2024), 228
- Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 173, *Al Quran dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2024), 269
- Augusman Zalukhu, Victoria E. N. Manoppo, dan Jardie A. Andaki, "Analisis Konflik Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)* 5, no. 9 (8 Agustus 2017), <https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.9.2017.17007>.
- Augusman Zalukhu, Victoria E. N. Manoppo, dan Jardie A. Andaki, "Anilisis Konflik Nelayan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa," *AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)* 5, no. 9 (8 Agustus 2017), <https://doi.org/10.35800/akulturasi.5.9.2017.17007>.
- Afriandi, Fadli, Ligar Abdillah, and Muntaha Mardhatillah. "Penguatan Lembaga Adat Panglima Laot: Pembelajaran dari penyelesaian Konflik Nelayan dalam mewujudkan Komunitas Nelayan yang Inklusif." *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan* 10.1 (2024): 59-70. Vol. 10. No. 1. 2024
- Candra Dkk "Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai " *Journal Syntax Idea* Vol. 6, No. 10, Oktober 2024
- Chrissyca Halim, Ngajudin Nugroho, dan Fauzi Akbar Maulana Hutabarat, "Analisis Komunikasi Di PT. Asuransi Buana Independet Medan," *Jurnal Ilmiah Simantek* 3, no. 1 (Februari 2019).
- Endang Bidayani, Dan Kurniawan. " Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Antara Nelayan Dengan Penambang Timah Dan Inkonfensional," *Society* Volume 8, (2020).139
- Endang Bidayani, Dkk. "Resolusi Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir Antara Nelayan Dengan Penambang Timah Inkonfensional,"30
- Febri Karisma Dkk, Konflik Alat Tangkap Ikan Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis" *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol 2, No 2, Desember 2018
- Kurniadi, Akbar, Dkk. "Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan

- Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara* 9.1 (2019): 91-108.
- Konflik di MI Bojongmalang: Model Penyelesaian Konflik dan Teknik Negosiasi dalam Membangun Lingkungan Belajar yang Harmonis." *Excellent: Journal of Islamic Studies* 2.1 (2025): 32-40.
- Nugraheni Arumsari Dkk "Startegi Komunikasi Dalam Upaya Penelesaian Komflik Nelayan Pantai Utara Di Kabupaten Batang" *Integralistik* Volume 31 (1) (2020)
- Nur Hidayati Al Maghfiroh, "Kontruksi Fishing Ground: Konflik Antar Nelayan Kabupaten Lamongan Dan Gresik Tahun 1999-2024" 9, *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia no. 2* (2020).
- Nurliana Cipta Apsari Dan Santoso Tri Raharjo "Resolusi Konflik Nelayan Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang" *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 1(2021). 29
- Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial. *Jurnal Sosial dan Humaniro*, 1(1), 1-11.
- Prayogi, Arditva, et al. "Konsep Konflik dan Teori Konflik Sosial.". *Jurnal Sosial dan Humaniro* 1.1 (2025): 1-11.
- Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2 ed. (Bandung: 29, 2022).139-144
- Prof. Dr. Alo Liliweri, M.S. (2009). *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta LKIS Yogyakarta
- Rahmat Dilta Harahap, "Modal Sosial Sebagai Bentuk Manajemen Konflik pada Komunitas Nelayan di Kabupaten Aceh Barat," *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis) : Jurnal Agribisnis dan Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian* 9, no. 3 (9 Juli 2024): 226–37, <https://doi.org/10.37149/jia.v9i3.1160>.
- Sulthon, A. S. I., Dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Multikultural Melalui Edu-Ekowisata: Studi Kasus Paguyuban Paku Lima Dusun Mandaran Desa Pesisir
- Suparman Abdullah dkk., "Manajemen Dan Resolusi Konflik Komunitas Nelayan Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Komunitas Nelayan Etnis Bugis Dan Makassar)," 2022.
- Susetyo, Susetvo, Ikram Ikram, And Anita Damavantie. "Pendekatan Sistemik Untuk Analisis Dan Transformasi Konflik: Studi Kasus Konflik Sosial Di Desa Balinuraga." *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya* 24.1 (2022): 108-125.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, konsep teori dan permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38-52. Journal.Unita

Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5.2 (2024): 198-211.

Yulianto, Winasis, et al. "Konflik Klasik Nelayan Tradisional Dengan Nelayan Modern Di Kabupaten Situbondo." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*. Vol. 3. No. 1. 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUBVARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Resolusi Konflik Antar Nelayan Pesisir Utara Jawa Timur Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo	1. Konflik Antar Nelayan Di Desa Pesisir	1. Dampak Konflik	1. Upaya Penyelesaian Konflik	a. Pendekatan penelitian kualitatif b. Jenis penelitian deskriptif c. Subyek penelitian <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Desa - Juragan Perahu - Masyarakat Nelayan d. Teknik pengumpulan data : <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi e. Analisis data <ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulann data - Reduksi data - Menyajikan data - Kesimpulan dan verifikasi f. Keabsahan data <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi teknik - Triangulasi sumber 	1. Bagaimana fenomena konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo? 2. Bagaimana resolusi konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?

	2. Desa Pesisir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resolusi Konflik Antar Nelayan 2. Tujuan Penelitian Resolusi Konflik Antar Nelayan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Resolusi konflik Antar Nelayan 1. Untuk mengetahui fenomena terjadinya konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 2. Untuk mengetahui resolusi konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 	
--	-----------------	--	---	--

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah

NIM : 211103020002

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan kalim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 21 Mei 2025

Saya yang menyatakan



SITTI RAHMATIL H
NIM: 211103020002

PEDOMAN OBSERVASI

Kisi-Kisi Observasi Resolusi Konflik Antar Nelayan Pesisir Utara Jawa Timur
Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

No	Data yang Diperlukan	Objek yang Dilihat
1	Juragan Perahu	Koordinator bagian jurahan perahu dan pemilik perahu
2	Masyarakat Nelayan	masyarakat biasa, dan warga nelayan
3	Pemerintah Desa	Staf pemerintah desa dan tokoh masyarakat sekitar nelayan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah

Alamat : Pemerintah Desa

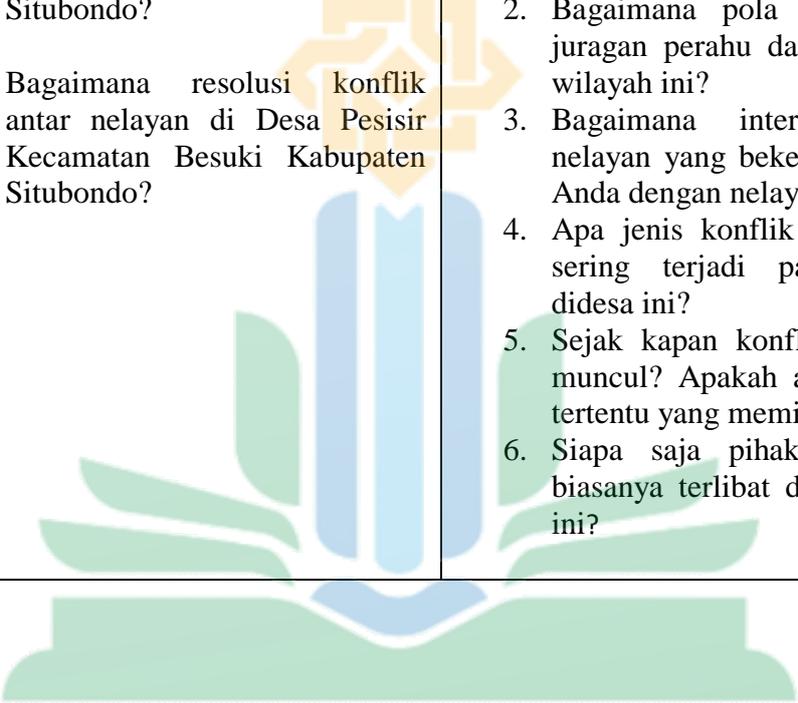
Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana fenomena konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?2. Bagaimana resolusi konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Sejarah Konflik Nelayan di Kecamatan Besuki? Apakah Konflik ini baru Muncul apa sudah berlangsung lama?2. Apa saja Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk Menangani terjadinya Konflik antar Nelayan di Desa Pesisir?3. Apa Strategi jangka panjang Pemerintah untuk mengurangi Resiko Konflik di Wilayah Pesisir?4. Bagaimana Pemerintah Desa memahami akar permasalahan Konflik antar Nelayan di Desa Pesisir?5. Apakah Pemerintah Desa telah Mengidentifikasi Pihak-Pihak yang sering terlibat dalam Konflik ini?6. Apa Hasil Mediasi yang pernah dilakukan? Apakah Konflik berhasil diredam atau muncul kembali?

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah

Alamat : Juragan Perahu

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana fenomena konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?2. Bagaimana resolusi konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?	<ol style="list-style-type: none">1. Berapa banyak perahu yang Anda miliki? Berapa nelayan yang bekerja dengan Anda?2. Bagaimana pola kerja antara juragan perahu dan nelayan di wilayah ini?3. Bagaimana interaksi antara nelayan yang bekerja di perahu Anda dengan nelayan lain?4. Apa jenis konflik yang paling sering terjadi pada nelayan didesa ini?5. Sejak kapan konflik ini mulai muncul? Apakah ada peristiwa tertentu yang memicunya6. Siapa saja pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam konflik ini?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah

Alamat : Masyarakat Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

Fokus Penelitian	Daftar Pertanyaan
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana fenomena konflik nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?2. Bagaimana resolusi konflik antar nelayan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah yang ada ketahui tentang konflik yang terjadi antara para nelayan di desa pesisir?2. Apa penyebab terjadinya konflik antar nelayan tersebut?3. Sejak kapan konflik ini muncul, dan apakah anda melihat adanya perubahan dalam intensitasnya?4. Apa dampak konflik ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa pesisir?5. Apakah anda merasa pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat pesisir terkait konflik antar nelayan?6. Apa harapan anda terhadap resolusi konflik antar nelayan di desa pesisir?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Profil Desa pesisir
2. Kantor Pengelola Desa pesisir dan kantor desa pesisir
3. Data pendapatan ekonomi masyarakat nelayan di desa pesisir sebelum dan sesudah adanya konflik
4. Data rata-rata pekerjaan masyarakat masyarakat desa besuki
5. Desa pesisir
6. UMKM Masyarakat
7. Dokumentasi foto



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah

NIM : 211103020002

Judul : Resolusi Konflik Antar Nelayan Di Pesisir Kecamatan
Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur

No	Tanggal	Kegiatan	Cek list
1.	28 Desember 2024	Observasi tempat	✓
2.	29 Desember 2024	Pemberian Surat Izin	✓
3.	29 Desember 2024	Wawancara kepada Bapak Miftah	✓
4.	29 Desember 2024	Wawancara kepada Mas Husein	✓
5.	29 Desember 2024	Wawancara bersama Bu Sahimi	✓
6.	11 April 2025	Wawancara bersama Bapak Miftah	✓
7.	12 April 2025	Wawancara bersama Bapak Sonoto	✓

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi: alat tangkap perahu besar dan kecil



Dokumentasi: penanda bersandar perahu dan observasi laut pesisir



Dokumentasi: wawancara bersama mas husein dan ibuk sahim



Dokumentasi: wawancara bersama bapak sonoto dan bapak miftah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI MOHAMMAD
SIDDIQ
Jember



Dokumentasi: wawancara bersama bapak rahmad

SURAT PERMOHONAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 2339/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 5 /2025 22 Mei 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.
Kepala Desa Pesisir

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah
NIM : 211103020002
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Resolusi Konflik Antar Nelayan Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur"

Demikian atas perkenan dan kerjasama. Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kalam bagaan,





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BESUKI
DESA PESISIR

Jalan Sepudi Nomor 09 Pesisir Kode Pos 68356

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 63 / 431502.2.7/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : AHMADI
Jabatan : Kepala Desa Pesisir

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SITTI RAHMATIL HASANAH
Jenis Kelamin : Perempuan
NIM : 211103020002
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VII (Tujuh)

Telah Melaksanakan Penelitian di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Pada tanggal 15 April 2025 Untuk Memperoleh Data Dalam Rangka Penyusunan skripsi dengan Judul "Resolusi Konflik Antar Nelayan Di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Jawa Timur"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Sitti Rahmatil Hasanah
NIM : 211103020002
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 28 November 2002
Alamat : Jln. Trunojoyo Gg. Asta Kauman Barat
RT/RW 004/003 Kecamatan Besuki
Kabupaten Situbondo
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
No. Telepon : 0881026467028
Email : sitirahmatil112811@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. PAUD : PAUD MAWAR
2. TK/RA : TK Al-Islah : TK Al – Ishlah Kec. Besuki, Kabupaten Situbondo
3. SD/MI : SDN 8 Besuki, Kab. Situbondo
4. SMP/MTS : SMPN 1 Banyuglugur, Kab. Situbondo
5. SMA/SMK/MA : SMAN 1 Besuki, Kab Situbondo
6. Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember